

**ANALISIS KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM
MENANGANI PEREDARAN NARKOTIKA DARI KOLOMBIA PADA
MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

**CHIKAL SANDIAWAN
18323213**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Kebijakan Amerika Serikat dalam Menangani Peredaran
Narkotika dari Kolombia Pada Masa Pemerintahan Barack Obama**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina

Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma S.Hub.Int., M.A.
- 2 Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A.
- 3 Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

Masitoh

Hangga Fathana

Karina

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR.....	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Cakupan Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Kerangka Pemikiran	10
1.7 Argumen Sementara.....	14
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 Jenis Penelitian	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	16
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	16
1.8.4 Proses Penelitian	16

1.9	Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....		18
HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT DAN KOLOMBIA		18
2.1	Hubungan Amerika Serikat Dengan Kolombia	18
2.1.1	Kerja Sama Peningkatan Keamanan.....	18
2.1.2	Bantuan Militer AS untuk Kolombia.	19
2.1.3	Hubungan Ekonomi Bilateral	20
2.2	Kebijakan War On Drugs di Era Pemerintahan Barack Obama. ..	22
BAB III		25
PENGARUH POLITIK DALAM NEGERI, EKONOMI DAN MILITER, SERTA KONTEKS INTERNASIONAL TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN WAR ON DRUGS.....		25
3.1	Pengaruh Politik Domestik	25
3.1.1	John Forbes Kerry Sebagai Aktor <i>Bureaucratic Influencers</i> Terhadap Pengambilan Keputusan Kebijakan <i>War On Drugs</i>	25
3.1.2	Dominasi Partai Demokrat Terhadap Pengambilan Keputusan Kebijakan <i>War On Drugs</i>	31
3.1.3	Pengaruh <i>Community Anti Drug Coalition of America (CADCA)</i> Sebagai <i>Interest Influencer</i> Terhadap Kebijakan <i>War On Drugs</i>	34
3.1.4	Pengaruh <i>Mass Influencers</i> Terhadap Pengambilan Keputusan Kebijakan <i>War On Drugs</i>	38
3.2	Pengaruh Ekonomi dan Militer Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat.	43
3.3	Pengaruh Konteks Internasional dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kolombia	49

BAB IV	55
PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Rekomendasi.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

14 Desember 2022.



Chikal Sandiawan

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DAN GAMBAR

Gambar 1. Teori Decision Making Process oleh William D. Coplin	11
Tabel 1. Pengaruh Policy Influencers dalam Kebijakan War on Drugs.	42
Tabel 2. Pengaruh Ekonomi & Militer terhadap Kebijakan War on Drugs.	48
Tabel 3. Penerapan Konteks Internasional dalam Hubungan AS-Kolombia	53



DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
CADCA	: Community Anti Drug Coalition of America
CSDI	: Colombia Strategic Development Initiative
CTPA	: Colombia Trade Promotion Agreement
DEA	: Drug Enforcement Administration
DPA	: Drug Policy Alliance
FARC	: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
HoR	: House of Representatives
IMF	: International Monetary Fund
INL	: International Narcotics and Law Enforcement Affairs
NGO	: Non-governmental organization
OAS	: Organization of American States
ONDCP	: Office for National Drug Crime Policy
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PNC	: The National Consolidation Plan
SACTA	: Supplement Agreement for Cooperation and Technical Assistance and Security
SAODAP	: Special Action Office for Drug Abuse Prevention
UNODC	: United Nation Office on Drugs and Crime
USAID	: United States Agency for International Development
USD	: United States Dollar
WTO	: World Trade Organization

ABSTRAK

Perang melawan narkoba menjadi hal yang sangat penting bagi Amerika bahkan dunia. Amerika mengawali perang melawan narkoba sejak masa kepresidenan ke-37 Richard Nixon, selanjutnya pada masa kepresidenan ke-41 George W. Bush kebijakan *war on drugs* dinilai belum memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan narkoba. Namun, kebijakan yang dinilai gagal pada masa kepresidenan George W. Bush dilanjutkan kembali pada masa kepresidenan Barack Obama. Teori *decision making* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat pada masa kepresidenan Barack Obama dalam mengatasi peredaran narkoba. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap kebijakan *war on drugs* yaitu: *Bureaucratic influencers, Partisan influencers, Interest influencer dan Mass influencer*. Argumen sementara dari dilanjutkannya kembali kebijakan *War on Drugs* pada masa Barack Obama adalah karena kepentingan Amerika dan Kolombia terhadap penguatan ekonomi dan militer serta keamanan negara, dominasi kader Partai Demokrat dan birokrasi politik dalam negeri AS, superioritas militer AS secara kuantitas maupun kualitas dan pengaruh Obama sebagai pengambil keputusan yang terbuka, rasional dan akomodatif-kooperatif. Oleh karena faktor-faktor tersebut Obama kembali menerapkan kebijakan *war on drugs* yang di nilai gagal pada masa George W. Bush.

Kata Kunci : War on Drugs, Amerika Serikat, Barack Obama, Kolombia, Pengaruh.

ABSTRACT

The war on drugs has become very important for America and even the world. America started the war on drugs since the 37th presidency of Richard Nixon, then during the 41st presidency of George W. Bush, the war on drugs policy was considered not to have had a significant impact in handling narcotics. However, the policy that was considered a failure during the presidency of George W. Bush was resumed during the presidency of Barack Obama. Decision making theory is used in this study to analyze problems related to the policies made by the United States during the presidency of Barack Obama in dealing with narcotics trafficking. There are four factors that influence decision making on war on drugs policy, namely: *Bureaucratic influencers, Partisan influencers, Interest influencers and Mass influencers*. The temporary argument for the resumption of the War on Drugs policy under Barack Obama is because of the interests of America and Colombia in strengthening the economy and military and state security, the dominance of Democratic Party cadres and the US domestic political bureaucracy, the superiority of the US military in quantity and quality and Obama's influence as a open, rational and accommodative-cooperative decision makers. Because of these factors, Obama re-implemented the war on drugs policy which was considered a failure during the George W. Bush era.

Keywords : War on Drugs, United States of America, Barack Obama, Colombia, Influence.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan bilateral Amerika Serikat (AS) dan Kolombia telah dijalin sejak 19 Juni 1822 pada awal masa kemerdekaan Kolombia dari jajahan Spanyol. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Kolombia dan telah mengirimkan perwakilannya pada tahun 1983. Hubungan kedua negara ini semakin erat pasca Perang Dunia II terutama pada sektor Ekonomi dan Keamanan. Amerika juga memberikan bantuan militer ke Kolombia yang membuat hubungan mereka semakin harmonis. Namun, hubungan kedua negara ini mulai mengalami perubahan ketika meningkatnya perdagangan narkoba ilegal yang terjadi di kawasan Amerika dan Eropa (Domingues, 1999, p. Chapter II).

Era globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap fenomena-fenomena lintas-batas, utamanya dipengaruhi oleh semakin derasnya arus mobilitas manusia dan informasi yang disebabkan perkembangan teknologi. Salah satunya adalah kemunculan dari kejahatan terorganisir transnasional (*transnational organized crimes*). Kejahatan terorganisir transnasional merupakan suatu kegiatan terorganisir yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan melalui cara-cara ilegal, salah satunya dengan menjual komoditas dagang apapun yang dapat memberikan keuntungan maksimal dengan risiko yang seminimal mungkin. Kegiatan kejahatan transnasional ini antara lain meliputi pencucian uang, terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan hewan, penjualan senjata, pembajakan, perdagangan manusia seperti penjualan organ

tubuh manusia dan prostitusi, serta berbagai kejahatan lainnya yang melintasi batas negara. Perdagangan narkoba ilegal selalu menjadi problematika global yang tak kunjung usai. Bahkan perkembangan globalisasi yang mengusung dunia tanpa batas (*world without borders*) semakin rentan untuk dimanfaatkan para aktor kejahatan transnasional terorganisir (*transnational organized crime*) dalam beroperasi dan bertransaksi (McFarlane, 2001).

Pada tahun 1980-an angka pengguna narkoba di Amerika Serikat meningkat, yang mana pada masa itu penggunaan Narkoba jenis kokain sedang marak dan menjadi tren di kalangan pekerja seni hingga politisi. Maraknya penggunaan kokain inilah yang kemudian mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat melarang masyarakatnya mengonsumsi dan mengedarkan obat-obatan terlarang jenis apapun secara komersil, dari yang sebelumnya melegalkan penggunaan dan peredaran narkoba jenis apapun untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Pasca pemerintah Amerika Serikat melarang penggunaan dan peredaran secara umum menyebabkan melambung tingginya harga narkoba karena banyaknya halangan yang ditemui oleh para bandar. Hal tersebut juga menyebabkan maraknya perdagangan dan peredaran narkoba secara ilegal (McCarthy, 2011).

Menurut William Rhodes, banyaknya para pecandu narkoba di Amerika Serikat menimbulkan banyak efek negatif bagi AS. Dalam aspek kesehatan, rata-rata sebanyak 52.600 per tahunnya orang meninggal dan 14.200 dikarenakan overdosis dalam mengonsumsi kokain dan juga munculnya penyakit kronis seperti HIV/AIDS dikarenakan penggunaan alat-alat untuk mengonsumsi narkoba secara bergantian. Dalam aspek ekonomi, Amerika Serikat mengalami

kerugian setiap tahunnya dikarenakan untuk memenuhi fasilitas rehabilitasi para pecandu narkoba tersebut (Rhodes, 1988-1993).

Melihat bahwa perdagangan narkoba ilegal ini sangat krusial dan memiliki dampak yang luas, tentu saja membuat Amerika Serikat melakukan upaya untuk menangani permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan AS adalah *war on drugs* yang pertama kali diproklamkan oleh Presiden Nixon pada 17 Juni 1971. Nixon secara resmi mendeklarasikan "Perang Melawan Narkoba", menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah "musuh publik nomor satu". *War on drugs* sendiri merupakan inisiatif Kebijakan pemerintah AS untuk menghentikan penggunaan, distribusi, dan perdagangan narkoba dalam skala global (Coyne, 2016). Nixon juga mengumumkan pembentukan lembaga khusus untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba yang bernama *Special Action Office for Drug Abuse Prevention* (SAODAP). Nixon kemudian membentuk *Drug Enforcement Administration* (DEA) pada tahun 1973. Badan ini adalah pasukan polisi khusus yang berkomitmen untuk menargetkan penggunaan dan penyelundupan obat-obatan terlarang di Amerika Serikat (Editors, 2017). Sepanjang sejarah, kebijakan *war on drugs* dilakukan melalui berbagai keputusan seperti peningkatan anggaran untuk lembaga penegak hukum, bantuan pembiayaan, intervensi militer dan kerjasama eksternal untuk mengurangi obat-obatan terlarang di pasar gelap.

Pada 1980-an, Presiden Ronald Reagan memperkuat dan banyak memperluas kebijakan *War on Drugs*. Pada tahun 1984, istrinya Nancy Reagan meluncurkan kampanye "*Just Say No*", yang dimaksudkan untuk menyoroti bahaya penggunaan narkoba. Pemfokusan ulang Presiden Reagan pada narkoba

dan pengesahan hukuman berat untuk kejahatan terkait narkoba di Kongres dan legislatif negara bagian menyebabkan peningkatan besar-besaran dalam penahanan untuk kejahatan narkoba tanpa kekerasan. Pada tahun 1986, Kongres mengesahkan Undang-Undang Anti- Penyalahgunaan Narkoba, yang menetapkan hukuman penjara wajib minimum untuk pelanggaran narkoba tertentu. Undang-undang ini kemudian dikritik keras karena memiliki konsekuensi rasis yang mengalokasikan hukuman penjara lebih lama untuk pelanggaran dengan jumlah kokain yang sama. 5 gram kokain crack yang lebih sering digunakan oleh orang kulit hitam Amerika memicu hukuman lima tahun otomatis sedangkan kokain bubuk yang lebih sering digunakan oleh orang kulit putih Amerika membutuhkan kepemilikan 500 gram untuk mendapatkan hukuman yang sama (Editors, 2017).

Peredaran narkotika secara ilegal merupakan masalah yang menjadi ancaman di seluruh dunia, begitu juga bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan tingkat peredaran tertinggi oleh karena itu Kolombia sebagai penghasil kokain terbesar di dunia menjadikan AS sebagai tujuan distribusi kokain mereka sebagai tujuan utama. Amerika Serikat merupakan pasar bagi Kolombia, menurut *Office for National Drug Crime Policy* (ONDCP), bahwa 95% kokain yang berada di Amerika Serikat berasal dari Kolombia. Situasi tersebut kemudian membuat Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Kolombia untuk membantu militer dan kepolisian nasional Kolombia dalam mengurangi produksi narkotika di Kolombia (Davenport, 2011). Dalam upaya tersebut, pemerintah AS memberi bantuan yang cukup besar ke Kolombia yakni dalam strategi enam tahun Kolombia yang diumumkan pada tahun 1999 dan dikenal sebagai *Plan Colombia*. Pada masa pemerintahan

Presiden Bill Clinton, 13 Juli 2000 pemerintah AS menandatangani sebuah program yang berisi bantuan dana awal yang diberikan ke Kolombia untuk kebutuhan *Plan Colombia* sebesar \$860 juta. Pada era pemerintahan George W. Bush, pemerintah Amerika Serikat memberikan dana lanjutan untuk program ini sebesar \$463 juta pada tahun 2004 (Issacson, 2005). Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Kolombia dalam program *Plan Colombia* ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh dua faktor. Pertama, adanya permasalahan laten pada negara penerima, dalam kasus ini Kolombia memiliki permasalahan dalam penegakan hukum yang disebabkan karena adanya subordinasi hukum dan lemahnya penegakan hukum di Kolombia. Faktor kedua, adanya misdiagnosa strategi yang dialami oleh Amerika Serikat selama pembentukan strategi program Plan Kolombia. Tumpang tindih penentuan prioritas target sasaran operasi dari *war on drugs* disebabkan karena adanya keterkaitan antara kelompok penyelundup narkoba dengan kelompok pemberontak (Aryadevi, 2016)

Pada tahun 2010, pemerintahan Obama tetap memberikan bantuan kepada Kolombia sebesar \$513 juta yang dialokasikan untuk program Plan Kolombia (COHA, 2009). Meskipun belum menunjukkan hasil yang signifikan, situasi tersebut tidak mempengaruhi Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Barack Obama untuk terus berupaya dalam menangani kasus peredaran narkoba ini melalui kebijakan *War on Drugs*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama dalam menangani peredaran narkotika di Amerika Serikat dari Kolombia. Maka, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengapa Amerika Serikat tetap mengeluarkan kebijakan *War on Drugs* dalam menangani peredaran narkotika dari Kolombia pada masa pemerintahan Barack Obama?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif mengapa Amerika Serikat tetap menerapkan kebijakan *War on Drugs* dalam menangani peredaran narkotika dari Kolombia pada masa pemerintahan Barack Obama dan melihat apakah dampak dari kebijakan tersebut lebih signifikan daripada masa sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan *War on Drugs* pada masa pemerintahan Barack Obama memiliki perbedaan dengan masa pemerintahan sebelumnya.

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait penyebab Amerika Serikat kembali menerapkan kebijakan yang belum menghasilkan dampak yang signifikan pada masa pemerintahan sebelumnya dan kembali diterapkan pada pemerintahan Barack Obama. Amerika Serikat merupakan pasar bagi Kolombia sebagai penghasil kokain terbesar di dunia. Menurut ONDCP, bahwa 95% kokain yang berada di Amerika Serikat berasal dari Kolombia. Dalam hal ini, sejak tahun 1999 pemerintah AS dalam kebijakan *War on Drugs* memberikan bantuan kepada Kolombia melalui program *Plan Colombia* yang dijadikan sebagai upaya

untuk mereduksi produksi narkoba yang ada di Kolombia untuk mengurangi pasokan yang beredar di Amerika Serikat. Pada masa pemerintahan George W. Bush, pemerintah AS memberikan bantuan dana sebesar \$463 juta sebagai dana lanjutan untuk *Plan Colombia*, namun upaya ini dianggap gagal yang dikarenakan oleh beberapa faktor (Issacson, 2005). Pada tahun 2010, pemerintahan Obama tetap memberikan bantuan kepada Kolombia sebesar \$513 juta yang dialokasikan untuk program *Plan Colombia* (COHA, 2009). Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk menulis mengenai penanggulangan narkoba dari Kolombia pada masa pemerintahan Barack Obama atas kebijakan yang kembali dikeluarkan oleh pemerintahan Barack Obama. Disisi lain, Obama merupakan presiden yang paling progresif dalam mengatasi permasalahan narkoba yang dilihat dari penanganannya terhadap epidemi opioid dan legalisasi ganja di tingkat negara bagian. Obama dan pemerintahannya telah melakukan pendekatan terhadap obat-obatan yang tidak terbayangkan selama masa jabatannya (Lopez, 2017). Dalam cakupan penelitian ini, penulis membatasi dengan periode pemerintahan yaitu pada masa pemerintahan Barack Obama 2009-2017.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kebijakan Amerika Serikat dalam menangani permasalahan narkoba pada masa Pemerintahan Barack Obama, banyak dijelaskan dalam jurnal salah satunya dari Sherrod D. Hollingshed yang menjelaskan bahwa saat kebijakan *War On Drugs* pada masa pemerintahan Barack Obama memiliki perubahan penting yang dilakukan yaitu pengurangan disparitas hukuman untuk kepemilikan kokain, penghapusan hukuman wajib minimum lima tahun bagi pemilik kokain serta

mengikuti kebijakan hukum “*hands off*” negara bagian dalam pelaksanaannya. Banyak juga negara bagian yang mendekriminalisasi marijuana atau ganja salah satunya adalah Colorado. Presiden Barack Obama juga banyak meringankan hukuman bagi orang-orang yang dijatuhi hukuman hanya karena terlibat dengan pelanggaran narkoba tanpa adanya keterlibatan pelanggaran pada hal lain seperti kekerasan atau pelanggaran kejahatan lainnya dan sebagian besar yang diringankan hukumannya hanyalah pengguna biasa. (Hollingsed, 2019).

Berbeda dengan yang dikatakan dalam jurnal tulisan Holingshed, ia menyebutkan bahwa Amerika Serikat dalam upayanya memberantas narkoba di negara mereka, mengurangi pasokan dengan menekan peredaran gelap produksi obat. Pemberantasan atau penghancuran fisik tanaman adalah strategi yang digunakan oleh Amerika untuk mengurangi produksi obat-obatan terlarang di negara-negara sumber. Pemberantasan dapat terjadi dengan memaksa atau didorong secara sukarela dengan tiga metode berikut: pemindahan tanaman secara manual, penggunaan herbisida, atau pengendalian biologis menggunakan patogen atau predator.

Literatur selanjutnya adalah jurnal tulisan Rodrigo H. G. Ferreira yang menyebutkan bahwa AS dalam upayanya berhasil membongkar salah satu kartel narkoba terbesar dan berbahaya di AS karena dampak dari mengekstradisi penjahat dari Mexico dan dituntut di Amerika. Hal itu disebabkan karena bantuan Amerika terhadap Mexico dalam memberantas narkoba di negaranya. Dalam hal ini, sama halnya dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap Kolombia yang juga membantu Kolombia untuk mengatasi peredaran narkoba di negara Kolombia sehingga dapat menjadi salah satu acuan atau indikator akan keberhasilah

kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Kolombia, apakah tindakan Amerika Serikat yang dilakukan kepada Kolombia menunjukkan hasil yang signifikan atau tidak.

Literatur selanjutnya berasal dari Jurnal Hubungan Internasional tulisan Chintya Aryadevi, dalam jurnal tersebut menyebutkan *Plan Kolombia* menjadi salah satu kebijakan *war on drug* Amerika Serikat yang memberikan bantuan luar negeri Amerika Serikat kepada pihak Kolombia yang bertujuan untuk mengurangi produksi narkotika jenis kokain. Dijelaskan juga bahwa *Plan Kolombia* gagal dalam upaya mereduksi produksi karkotika jenis kokain tersebut. Pada penelitian ini menjelaskan tentang sebab-sebab yang menjadi kegagalan dalam penerapan *Plan Kolombia*, terdapat tiga elemen penting yang menjadi fokus pada penelitian ini, pertama, konsep bantuan luar negeri yang diberikan Amerika pada Kolombia, kedua, penyebab gagal nya bantuan luar negeri yang di berikan Amerika, ketiga, tentang organisasi kriminal transnasional. argumen yang di bangun dalam penelitian ini adalah kegagalan Plan Kolombia yang di akibatkan oleh kesalahan diagnosa dalam upaya penerapan strategi serta penerapannya.

Literatur terakhir yang ditulis oleh Dira Permata Sari, menyimpulkan bahwa kebijakan *war on drugs* menjadi identitas Amerika Serikat sebagai negara anti narkoba. Kebijakan *war on drugs* sudah diterapkan sejak era presiden Richard Nixon dan diteruskan ke presiden selanjutnya. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa Plan Kolombia bertujuan untuk mereduksi produksi kokain di Kolombia dengan menggunakan metode fumigasi udara, pada tahun 2000 sampai 2001. Plan Kolombia di jalankan dan di implementasikan secara efektif sehingga berhasil mereduksi produksi kokain. Upaya perdamaian dengan menggunakan

perundingan damai antara Pasukan Revolusi Kolombia (FARC) dengan pemerintah Kolombia juga dilakukan oleh pemerintahan Presiden Clinton, namun upaya perundingan damai gagal mencapai tujuannya.

Dari beberapa literatur di atas telah menjelaskan bagaimana Amerika Serikat dalam penanganan masalah narkoba serta dampaknya sendiri terhadap Amerika, sehingga sangat berguna bagi penulis untuk mengembangkan penelitian terkait analisis kebijakan Amerika Serikat dalam menangani peredaran narkoba di negaranya. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis lebih lanjut mengenai kebijakan terkait narkoba pada masa pemerintahan Barack Obama.

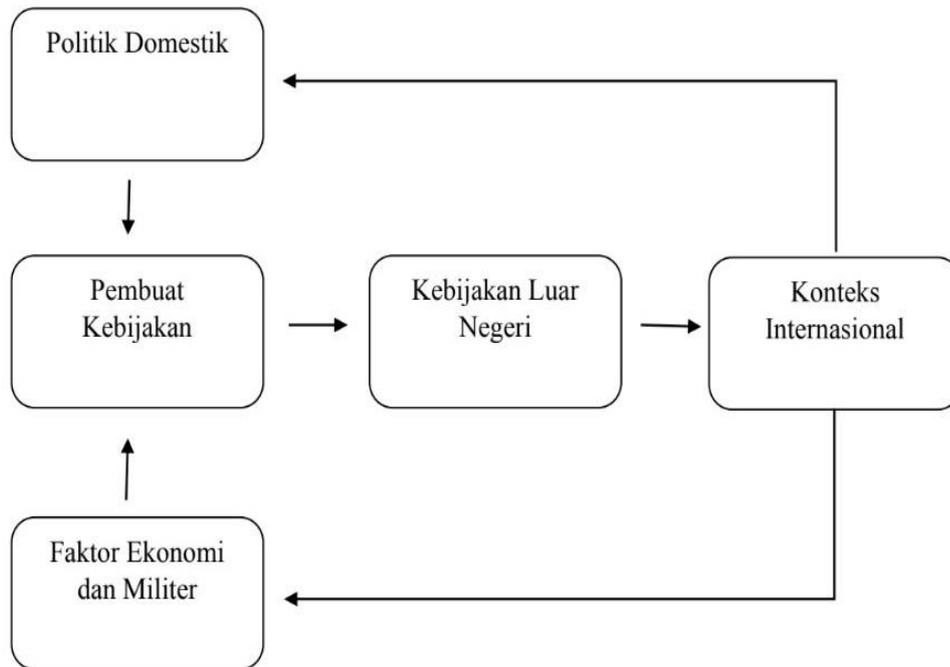
1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menerapkan teori pengambilan keputusan kebijakan luar negeri untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor pendorong yang menjadi pertimbangan Presiden Barack Obama terkait penggunaan kebijakan yang sama dengan presiden sebelumnya. Pendekatan teoritis menganut asumsi dasar bahwa setiap tindakan internasional didefinisikan sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh unit politik domestik dan pemimpin negara baik individu atau kelompok yang bertindak sebagai aktor utama dalam proses pembuatan kebijakan (Jensen, 1987).

Dalam penulisan karya ilmiah, peran teori tentunya sangatlah penting untuk dijadikan sebagai landasan penelitian. Dalam ilmu hubungan internasional, peran teori merupakan peran penting yang digunakan untuk menganalisis problematika atau fenomena yang terjadi di dunia internasional. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis rumusan masalah menggunakan teori *Decision Making* menurut Coplin. Menurut Coplin, teori *decision making* merupakan

sebuah cara untuk sebuah negara mengetahui perilaku negara dalam hubungan internasional.

Gambar 1. Teori *Decision Making Process* oleh William D. Coplin



Menurut Coplin, terdapat tiga unsur penting yang menjadi pertimbangan agar dapat menentukan proses dibuatnya satu kebijakan oleh suatu negara.

Pertama, faktor politik domestik negara atau faktor *internal* suatu negara, dalam faktor politik domestik ini meliputi peran atas kepentingan yang dimiliki oleh kelompok, birokrat sebagai aktor yang mempengaruhi kebijakan pada level nasional atau politik dalam negeri, dan partai politik. Dalam faktor politik setidaknya ada empat hal yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan:

- *Bureaucratic influencers*, orang perseorangan atau lembaga dalam badan penyelenggara negara yang membantu pengambil keputusan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan negara;
- *Partisan influencers*, partai politik dalam lembaga legislatif negara yang

perannya beragam seperti menjembatani kesenjangan antara tuntutan publik dan kebijakan eksekutif, baik mendukung maupun menghalangi kebijakan pemerintah;

- *Interest influencer*, kelompok atau organisasi informal yang mewakili kepentingan tertentu dan berjuang untuk mempengaruhi pemerintah untuk memaksakan atau menolak kebijakan apa pun sesuai dengan preferensi mereka; dan

- *Mass influencer*, opini publik yang dihasilkan oleh populasi tertentu dan sering dipertimbangkan oleh pengambil keputusan negara saat merumuskan kebijakan luar negeri (William D Coplin, 1992),

Kedua faktor ekonomi dan militer, dalam faktor ekonomi dan militer ini, sejarah perkembangan kondisi ekonomi negara, kapasitas produksi nasional dan ketergantungan negara terhadap perdagangan internasional menjadikan faktor penting dalam aspek ekonomi. Perkembangan ekonomi yang cukup besar untuk mempengaruhi negara dalam mengeluarkan suatu kebijakan luar negeri. Adapun dalam aspek militer dapat diukur melalui peran kapasitas dalam penggunaan kekuatan militer dan keamanan nasional terhadap aktor luar negeri, kedua hal tersebut memiliki pengaruh penting yang cukup untuk menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam teori *decision making* pengambilan keputusan politik luar negeri terdapat dua variable penting yang tidak dapat dipisahkan, variable tersebut adalah ekonomi dan militer. Semakin kuat militer suatu negara maka tingkat kemakmuran suatu negara juga tinggi dan begitu juga sebaliknya, jika ekonomi suatu negara meningkat, maka militernya pun semakin kuat (William D Coplin, 1992, p. 112).

Ketiga, adalah faktor keadaan internasional, dalam faktor keadaan

internasional ini dimaksudkan bahwa untuk membuat suatu kebijakan satu negara juga harus mempertimbangkan kondisi politik luar negerinya sendiri dalam artian kondisi hubungan dengan negara lain dalam sistem internasional akan menentukan bagaimana seharusnya negara mengambil sikap, oleh karena itu hal ini sangat mempengaruhi suatu negara dalam mempertimbangkan arah suatu kebijakan. Pada poin ini didasari oleh poin pertama tentang kebijakan dalam negeri dan point kedua tentang ekonomi dan militer yang menentukan bagaimana pengambilan keputusan luar negeri dapat dilakukan.

Pengambil keputusan kebijakan luar negeri adalah mereka yang menghadapi situasi tertentu dan mereka harus mempertimbangkan semua faktor penentu seperti politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer dan konteks internasional. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah suatu pemecahan masalah yang rasional sehingga pengambil keputusan mempertimbangkan sejumlah alternatif pilihan serta tujuan yang ada, dan salah satunya diambil sebagai keputusan terbaik. Di sisi lain, tindakan kebijakan luar negeri adalah implementasi dari pilihan yang lebih disukai yang diambil oleh para pengambil keputusan negara. Selama proses pengambilan keputusan, kepentingan nasional tetap menjadi tujuan utama kebijakan luar negeri yang sebenarnya merupakan representasi dari pengaruh kebijakan (W. D. Coplin, 1992).

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait dengan tiga faktor yang mempengaruhi mengapa Amerika Serikat tetap mengeluarkan kebijakan *War on Drug* dalam menangani peredaran narkoba dari Kolombia pada masa pemerintahan Barack Obama, karena mengingat pada masa Pemerintahan George W. Bush kebijakan tersebut tidak menunjukkan hasil yang signifikan tetapi pada

masa pemerintahan Barack Obama tetap menerapkan kebijakan tersebut. Pertama, pada faktor internal memperhatikan bagaimana keadaan domestik di AS dengan masa pemerintahan Barack Obama. Kedua, karena kekuatan ekonomi AS sebagai negara adidaya yang membuat AS melontarkan bantuan dana kepada Kolombia sebagai upayanya dalam memberantas peredaran narkotika di AS dan pada sektor militer, AS juga mengirimkan bantuan pasukan militer ke Kolombia sebagai pemasok narkoba ilegal ke AS untuk membantu Kolombia dalam pengendalian lahan penghasil daun kokain, opium, dan ganja. Sedangkan pada faktor ketiga dalam hal ini, AS sebagai negara yang memegang hegemoni di benua Amerika menyebabkan AS dapat mempengaruhi Kolombia agar memberantas narkotika di negaranya sebagai salah satu pemasok narkotika ilegal terbesar di AS demi kepentingan AS dalam mengurangi peredaran narkotika di AS.

Menurut penulis, teori ini sangat tepat digunakan untuk membantu dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama dalam mengatasi peredaran narkotika, karena teori ini mempertimbangkan penyebab dibuatnya suatu kebijakan melalui tiga faktor tersebut.

1.7 Argumen Sementara

Argumen sementara atau hipotesis yang dapat di simpulkan dalam penelitian ini adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan *War on Drugs* pada masa kepresidenan Barack Obama, **Pertama**, faktor politik domestik negara atau faktor *internal* suatu negara, Dalam faktor politik setidaknya ada empat hal yang mempengaruhi dalam pengambilan

keputusan yaitu *bureaucratic influencers*, *partisan influencers*, *interest influencer* dan *mass influencer*. Pengaruh birokratik diperankan oleh John Kerry, pengaruh partai diperankan oleh Demokrat sebagai pendukung Obama, kelompok kepentingan diperankan oleh *Community Anti Drug Coalition of America* (CADCA), dan pengaruh opini publik diperankan oleh berbagai elemen masyarakat yang membentuk iklim opini. **Kedua**, faktor ekonomi dan militer, dalam faktor ekonomi, kapasitas produksi nasional dan ketergantungan negara terhadap perdagangan internasional menjadikan faktor penting dalam aspek ini. Adapun dalam aspek militer dapat diukur melalui peran kapasitas dalam penggunaan kekuatan militer dan keamanan nasional terhadap aktor luar negeri. Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan memiliki kekuatan dalam aspek ekonomi serta militer dapat menggunakan kekuatan tersebut untuk menekan atau memberikan bantuan kepada Kolombia dalam memberantas produksi narkotika di negaranya demi mencapai tujuan AS. **Ketiga**, adalah faktor keadaan internasional Amerika Serikat dengan Kolombia yang mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan kondisi geografis, ekonomi, dan politik.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menjawab rumusan masalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur. Dimana segala sumber yang digunakan oleh penulis nantinya berasal dari jurnal, buku, *website* resmi, berita, serta data-data yang kredibel dan *valid*. Dan semua bahan kajian yang didapatkan oleh penulis nantinya akan dijadikan sumber pendukung dalam penelitian agar dapat dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan

masalah. Dan penelitian kualitatif ini nantinya akan menghasilkan data yang deskriptif

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Amerika Serikat pada masa kepresidenan Barack Obama. Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini adalah kebijakan Amerika Serikat dalam menangani peredaran narkoba dari Kolombia. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran secara spesifik analisa mengenai kebijakan Amerika Serikat tersebut serta dampaknya terhadap AS sendiri melalui analisis *decision making process*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan data sekunder yang akan digunakan sebagai referensi. Dimana sumber data yang akan digunakan oleh penulis berasal dari jurnal, buku, berita, serta data-data kredibel dan valid. Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga tahapan analisis (Miles H. , 2014): reduksi data, display data, dan verifikasi data. Data yang sudah terverifikasi akan di analisis kembali dan diinterpretasikan.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian sudah dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Dimana dalam proses penelitian kualitatif yang pertama kali dilakukan oleh peneliti yaitu mencari data-data yang valid yang akan digunakan sebagai referensi sehingga menjadikan sumber tersebut sebagai bahan pendukung penelitian. Kemudian, data-data yang diperoleh penulis akan dianalisis secara mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini berisi beberapa BAB yang terdiri dari BAB I sampai BAB IV dan menjadi satu-kesatuan. Berikut adalah penjelasan singkat terkait pembahasan setiap BAB dalam skripsi ini:

Pembahasan akan dimulai dari BAB I yang berisi latar belakang masalah, yang mana membahas hubungan Amerika Serikat dengan Kolombia dan perdagangan narkoba yang di salah gunakan oleh, serta terdapat juga tiga perjanjian pengadilan yang di keluarkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* Pada (UNODC). Sepak terjang Presiden George W. Bush dalam memberantas perdagangan ilegal narkoba juga dijelaskan pada BAB ini.

BAB II berisi tentang informasi yang menjelaskan tentang hubungan antara Amerika dengan Kolombia, sejarah *war on drugs*, dan kebijakan *war on drugs* yang berlaku pada masa pemerintahan Barack Obama.

BAB III akan membahas tentang faktor-faktor yang mendorong digunakannya kembali kebijakan yang dinilai gagal pada masa Presiden George W. Bush, data yang ada akan di paparkan dan di analisa serta di aplikasikan dalam teori *decision making*.

Terakhir, BAB IV yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penelitian dalam skripsi dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT DAN KOLOMBIA

2.1 Hubungan Amerika Serikat Dengan Kolombia

Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Kolombia pada 19 Juni 1822, setelah kemerdekaannya dari Spanyol. Kolombia adalah negara berpenghasilan menengah dan salah satu negara demokrasi tertua di Amerika Latin. Amerika Serikat dan Kolombia berbagi komitmen untuk mempromosikan keamanan, kemakmuran, dan pemerintahan yang demokratis di Kolombia dan di seluruh Belahan Barat. Dengan dukungan Amerika Serikat, Kolombia telah mengubah dirinya selama 20 tahun terakhir dari negara rapuh menjadi demokrasi yang dinamis dengan ekonomi berorientasi pasar yang berkembang (U.S Departement of State, 2021).

2.1.1 Kerja Sama Peningkatan Keamanan.

Amerika Serikat berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kolombia untuk menyelidiki, menangkap, mengadili, dan mengganggu anggota organisasi kriminal transnasional dan kelompok teroris yang kegiatannya, terutama perdagangan narkoba, yang menghancurkan warga kedua negara. Upaya ini berfokus pada penguatan supremasi hukum dan lembaga peradilan, termasuk keadilan transisional; meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia; meningkatkan peluang ekonomi; mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pedesaan; dan menghadapi kegiatan kriminal, termasuk produksi narkoba, penambangan liar, dan penggundulan hutan. Kolombia adalah mitra bagi Amerika Serikat dalam penegakan hukum dan masalah keamanan, termasuk upaya kontraterorisme dan kontranarkoba.

Amerika Serikat dan Kolombia memperkuat kerja sama keamanan dalam kesepakatan SACTA (*Supplement Agreement for Cooperation and Technical Assistance and Security*) yang bertujuan untuk melakukan pemantauan, pelacakan dan mencegah kegiatan perdagangan narkoba antara Kolombia dan Amerika Serikat, melalui berbagai rute yang digunakan oleh kartel obat dalam menyediakan perlengkapan dan tempat produksi akhir di pasar (U.S Department of State, 2009).

2.1.2 Bantuan Militer AS untuk Kolombia.

Pemerintah AS mendukung upaya Kolombia untuk transisi dari konflik menuju perdamaian dengan bekerja di daerah pedesaan yang terkena dampak konflik di Kolombia, di mana kekerasan, perdagangan narkoba, kurangnya kehadiran pemerintah, dan tidak adanya peluang ekonomi hukum secara historis bertemu. Program AS termasuk dukungan untuk inisiatif pemerintah Kolombia: implementasi reformasi tanah pemerintah Kolombia; dukungan dan perlindungan bagi populasi yang rentan termasuk anggota komunitas Pribumi dan Afro-Kolombia dan pembela hak asasi manusia; kesempatan pendidikan yang lebih besar; investasi publik dan swasta; reintegrasi mantan gerilyawan; dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, inklusi sosial, dan supremasi hukum.

Pada tahun 2009, dalam perjanjian *Defense Cooperation Agreement* (DCA) antara AS dan Kolombia untuk memperpanjang penggunaan tujuh pangkalan militer di Kolombia oleh AS namun tidak diperbolehkan untuk mendirikan pangkalan militer AS di Kolombia. Perjanjian ini memfasilitasi akses militer AS ke tiga pangkalan angkatan udara Kolombia yang berada di Palanquero, Apiay, dan Malambo serta mengizinkan akses ke dua pangkalan laut

dan dua pangkalan instalasi tentara tetapi untuk akses berkelanjutan militer AS ke fasilitas khusus Kolombia harus disepakati untuk melakukan kegiatan bersama di Kolombia. Perjanjian ini memberikan akses militer AS ke pangkalan di Kolombia akan tetapi kontrol, komando, dan keamanan akan tetap di bawah kendali Kolombia dan semua aktivitas yang akan dilakukan oleh militer AS harus disepakati bersama sebelumnya. Kehadiran militer AS di Kolombia tidak akan meningkat jumlahnya dan akan tetap sesuai dengan amanat kongres yaitu 800 personil tentara maupun anggota departemen pertahanan serta 600 *civilian military contractors* yang semuanya memiliki kekebalan hukum atau kekebalan terhadap tuntutan pidana di Kolombia (U.S Department of State, 2009). DCA akan memfasilitasi kerja sama bilateral dalam masalah keamanan di Kolombia termasuk produksi dan perdagangan narkoba, terorisme, dan kelompok bersenjata ilegal lainnya di Kolombia. Akses yang diberikan Kolombia ke militer AS dalam tujuh pangkalan juga bertujuan untuk meningkatkan operasi kontranarkoba dan kontraterorisme yang juga termasuk membantu pasukan Kolombia dalam pelatihan, dukungan logistik dan intelijen (Boadle, 2009).

2.1.3 Hubungan Ekonomi Bilateral

Kolombia adalah mitra dagang penting bagi Amerika Serikat, ditegaskan dalam *U.S.- Colombia Trade Promotion Agreement* (CTPA) yang mulai berlaku pada tahun 2012 dan telah mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di kedua negara. CTPA meningkatkan investasi dan menghilangkan tarif dan hambatan lain untuk ekspor AS dan perdagangan timbal balik. Ekspor pertanian AS meningkat lebih dari dua kali lipat di bawah CTPA.

Amerika Serikat adalah mitra perdagangan dan investasi terbesar

Kolombia, dengan investasi besar di sektor pertambangan dan manufaktur. Kolombia adalah mitra dagang terbesar ketiga Amerika Serikat di Amerika Latin, dengan perdagangan barang dan jasa dua arah dengan total \$29,9 miliar pada tahun 2020. Afiliasi milik AS menyumbang lebih dari 90.000 pekerjaan di Kolombia. Ekspor utama AS ke Kolombia meliputi minyak, jagung, dan peralatan suku cadang listrik. Impor utama AS dari Kolombia termasuk minyak mentah, kopi, dan bunga potong. Sekitar 450 bisnis AS memiliki investasi di Kolombia. Investasi langsung AS di Kolombia terutama terkonsentrasi di sektor pertambangan dan manufaktur. Banyak aktor sektor swasta bekerja dalam kemitraan erat dengan program bantuan AS, memanfaatkan sumber daya tambahan dan membantu memastikan proyek berkelanjutan di luar masa pendanaan AS.

Kolombia bergantung kepada AS dalam hal ekspor kopi dikarenakan AS merupakan sumber pendapatan utama ekspor kopi bagi Kolombia. Amerika Serikat juga melakukan investasi ke Kolombia dengan tujuan membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal Kolombia. Amerika Serikat melakukan program untuk menangani masalah ekonomi Kolombia dengan peran *United States Agency for International Development (USAID)* untuk membantu pemerintah Kolombia memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk bersaing dan kemudian mengelola dana masyarakat publik Kolombia yang tersedia untuk proyek infrastruktur produktif dan termasuk infrastruktur jalan (United States Agency for International Development, 2016).

2.2 Kebijakan War On Drugs di Era Pemerintahan Barack Obama.

Definisi kebijakan *war on drugs* pada penelitian ini menggunakan terminologi menurut Christopher J. Coyne yang merupakan inisiatif Kebijakan pemerintah AS untuk menghentikan penggunaan, distribusi, dan perdagangan narkoba dalam skala global (Coyne, 2016, p. 99).

Selama beberapa dekade, perang melawan narkoba telah ditandai dengan "*stop and frisk*" serangan militer di rumah-rumah orang, dan hukuman penjara yang dapat berlangsung selama beberapa dekade atau seumur hidup. Richard Nixon mendeklarasikan perang terhadap narkoba. Ronald Reagan meningkatkan perang dengan hukuman minimum "keras terhadap kejahatan". George H. W. Bush memberi pidato nasional televisi pertamanya tentang narkoba, memberi tahu negara bahwa narkoba adalah "ancaman domestik terbesar yang dihadapi bangsa kita saat ini" sambil memegang sekantong kokain yang disita. Bill Clinton menandatangani undang-undang yang didorong untuk hukuman penjara yang lebih keras dan melucuti sebagian besar hak pembelaan hukum narapidana penjara.

Kemudian datang harapan dan perubahan pada awal tahun 2016, Presiden Barack Obama mulai mengampuni dan memperpendek hukuman penjara ratusan narapidana federal. Pada bulan November, Obama mengatakan ingin memperlakukan ganja "sebagai masalah kesehatan masyarakat, seperti yang kita lakukan dengan rokok atau alkohol." Lalu Obama menandatangani tagihan yang akan menghabiskan \$1 miliar selama dua tahun untuk memerangi pertumbuhan obat penghilang rasa sakit opioid dan epidemi heroin, semua melalui program kesehatan masyarakat, bukan peradilan pidana.

Pada pemerintahan Obama, perlahan tapi pasti, bekerja untuk membentuk kembali bagaimana Amerika berperang melawan narkoba, memperlakukan narkoba sebagai masalah kesehatan masyarakat daripada tindakan peradilan pidana yang bersifat menghukum. Pergeseran pemerintahan Obama telah sengaja membentuk kembali dasar dalam cara Amerika menangani narkoba. Presiden Obama telah menggemakan sebuah sentimen dan menyarankan pendekatan kesehatan masyarakat lebih masuk akal untuk obat-obatan.

Pemerintahan Obama telah secara dramatis meningkatkan pengeluaran kesehatan masyarakat untuk upaya anti-narkoba, mengusulkan anggaran pengendalian obat pertama sejak Presiden Jimmy Carter pada akhir 1970-an yang akan menghabiskan lebih banyak untuk pengobatan dan pencegahan daripada penegakan hukum dan program larangan dalam memerangi narkoba. Puncak dari upaya ini datang pada bulan Desember ketika Obama menandatangani Undang-Undang Penyembuhan Abad 21 menjadi hukum. Undang-undang tersebut melakukan beberapa hal kontroversial dalam hal mempercepat proses persetujuan obat, tetapi juga meningkatkan pengeluaran untuk epidemi opioid sebesar 1 miliar USD.

Epidemi obat-obatan dalam skala saat ini dapat dengan mudah melemparkan Kongres dan Gedung Putih kembali ke cara lama mereka yang "keras terhadap kejahatan". Epidemi heroin dan penggunaan narkoba yang meluas pada tahun 1960-an membuat Nixon mendeklarasikan perang narkoba. Dan epidemi kokain tahun 80-an yang membuat Reagan mengeluarkan segala macam kebijakan anti-narkoba yang keras, seperti Undang-Undang Anti-Narkoba 1986. Namun Gedung Putih dan Kongres malah mendorong pendekatan yang lebih

lembut kali ini. Berfokus pada kesehatan masyarakat tidak hanya melalui RUU saat ini tetapi juga yang baru saja disahkan Undang-Undang Ketergantungan dan Pemulihan yang Komprehensif (Lopez, 2017)



BAB III

**PENGARUH POLITIK DALAM NEGERI, EKONOMI DAN MILITER,
SERTA KONTEKS INTERNASIONAL TERHADAP PENGAMBILAN
KEBIJAKAN WAR ON DRUGS**

Pada bab ini, peneliti akan mulai analisis data yang akan mencakup sebab-musabab terjadinya penerapan kembali kebijakan *War on Drugs* AS pada masa pemerintahan Obama, peneliti menggunakan Teori Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri (*Foreign Policy Decision Making Process Theory*) dari William D. Coplin. Aspek-aspek determinan yang memengaruhi penerapan kebijakan *War on Drugs* AS terdiri dari birokrasi politik pemerintah dalam negeri, dominasi partai politik, aspirasi masyarakat terhadap narkoba, serta kepentingan Amerika dan Kolombia terhadap penguatan ekonomi dan militer.

3.1 Pengaruh Politik Domestik

**3.1.1 John Forbes Kerry Sebagai Aktor *Bureaucratic Influencers*
Terhadap Pengambilan Keputusan Kebijakan *War On Drugs*.**

Coplin dalam bukunya mengatakan bahwa birokrasi yang memengaruhi menjadi salah satu komponen penting dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan disahkan, disebutkan juga bahwa sukar untuk membedakan antara anggota birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* dari pengambilan keputusan dan hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat kelompok-kelompok birokrasi sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (W. D. Coplin, 1992).

Dalam hal ini birokrasi memiliki peran penting dalam proses

penyusunan politik luar negeri, dalam sistem politik terbuka maupun tertutup. Dalam kedua sistem politik ini kelompok-kelompok birokrasi bergerak di balik layar guna mensuplay informasi-informasi yang akan digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan (W. D. Coplin, 1992).

Dalam konteks pengambilan kebijakan *War on Drugs*, John Forbes Kerry menjadi individu yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan *war on drugs*. Kerry merupakan Ketua Komite Senat untuk Urusan Luar Negeri Amerika Serikat pada 2009 hingga 2013 lalu Kerry melanjutkan karirnya menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke-68 yang dilantik pada 1 Februari 2013, Kerry menjadi Ketua Komite Senat untuk Urusan Luar Negeri Amerika Serikat pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam 1 abad terakhir. (U.S. Department of State, 2013).

Kerry dan Obama memiliki sentimen tersendiri dapat dilihat dari dukungan yang diberikan Kerry terhadap Obama saat kampanye pada tahun 2008. Kerry mengatakan Obama adalah “*The greatest potential to lead a transformation, not just a transition. Who better than Barack Obama to bring new credibility to America’s role in the world and help restore our moral authority?*” pada saat rapat umum di College of Charleston (Zeleny, 2008). Sebelum Kerry menjadi menlu, Kerry merupakan senator yang berpengaruh dan dinilai sangat memahami diplomasi. Kerry juga sering disebut sebagai utusan tidak resmi Obama dalam sejumlah kegiatan kepresidenan (Landler, 2012).

Obama mengajukan Kerry sebagai Menteri Luar Negeri untuk

menggantikan Hillary Clinton dan Obama sangat yakin bahwa senat akan menyetujuinya, Obama menyatakan bahwa Kerry merupakan pilihan yang tepat untuk membawa diplomasi Amerika untuk beberapa tahun kedepan karena ia sangat paham dengan semua elemen kekuatan yang dimiliki Amerika dan Hillary Clinton sebagai menlu sebelumnya berpendapat bahwa Kerry mampu menjaga dan memperluas kepemimpinan global Amerika (Obama White House, 2012).

Dibawah kepemimpinan Obama, Kerry sebagai menlu diutus untuk melakukan perjalanan ke Bogota, Kolombia untuk melakukan pertemuan dengan presiden dari negara tersebut untuk membahas isu regional terkait *counter-narcotics*. Pada pertemuan ini, Kerry berkunjung ke Markas Besar Pemberantasan Narkoba di Bogota dan memberikan sambutan mengenai kerjasama untuk memberantas narkoba yang sudah dijalin antara Amerika dan Kolombia. Setelah itu, Kerry melakukan diskusi dengan Menteri Luar Negeri Kolombia pada saat itu, Maria Angela Holguin yang salah satu pembahasannya adalah mengenai “*Plan Colombia*”. Dalam diskusi ini Kerry menyatakan,

“I think over the last years, beginning with Plan Colombia, the United States of America has made it as clear as we know how that we are on the side of the Colombian people in this effort to try to find peace. So I can guarantee you, having done this for these last many years, the United States is not going to suddenly stop being engaged or walk away from this peace process. As I mentioned in my opening comments, we are deeply supportive of what President Santos is trying to achieve, So the United States will support the peace process. No, there is not a specific delineated set of figures with respect to a budget because there is not yet a specific agreement around which to build that plan. But we will remain completely supportive of Colombia’s efforts to achieve the peace. I believe it’s a courageous path that the President has put Colombia on, and we will continue to support it” (U.S Department of State, 2013).

Lalu pada tahun berikutnya Kerry kembali melakukan perjalanan ke Amerika Selatan yaitu Peru dan Kolombia untuk bertemu dengan kedua presiden negara tersebut. Dalam pertemuannya di Peru, Kerry banyak membicarakan permasalahan narkoba, khususnya yang terjadi di regional Peru yang terdampak dari eradikasi narkoba yang terjadi di Kolombia yang disebabkan oleh meluasnya organisasi perdagangan narkoba. Namun pada pertemuannya dengan presiden Kolombia, Kerry lebih banyak menekankan bahwa Amerika Serikat sangat mendukung penuh upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kolombia dengan kelompok gerilyawan atau pemberontak yang ada di Kolombia. Salah satu pernyataan Kerry dalam pertemuannya dengan Presiden Kolombia saat itu adalah,

” The longer it takes, the harder it may get. And I would urge everybody to use time to advantage and to move, because as with any negotiation, they cannot be open-ended. They just exhaust possibilities without actually embracing the possibilities fully. So I encourage movement, and the United States will absolutely do its part with respect to that. The peace negotiations with FARC are a courageous example of leadership. And the United States is an unwavering supporter of the Colombian Government’s efforts to achieve a negotiated peace” (U.S Department of State, 2014).

Dalam hal ini pemerintah AS melalui pernyataan Kerry sangat mendukung upaya Kolombia untuk melakukan perdamaian dengan kelompok gerilyawan FARC yang mempunyai peran besar atas kontrol perdagangan dan peredaran narkoba yang ada di Kolombia untuk mencapai tujuan AS dalam menangani permasalahan narkoba yang ada di Amerika Serikat. Pemerintah AS melakukan dukungan ini untuk membatasi produksi kokain dan membendung aliran obat-obatan terlarang

ke Amerika Serikat (COHA, 2009). FARC telah ditetapkan sebagai daftar teroris oleh Amerika Serikat sejak 1997 dan banyak para anggotanya yang sudah didakwa di Amerika Serikat dengan dakwaan perdagangan narkoba (Brodzinsky Roberts, 2016).

Pada 4 Februari 2016, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos melakukan pertemuan dengan Barack Obama di gedung putih untuk merayakan 15 tahun “*Plan Colombia*”. Pada pertemuan ini Barack Obama menyatakan kerangka kerjasama yang baru dengan Kolombia serta melakukan transisi dari *Plan Colombia* ke *Peace Colombia* sebagai upaya untuk membantu Kolombia dalam mengatasi masalah konflik yang ada di internal negara Kolombia untuk mencapai perdamaian dengan kelompok pemberontak.

“So as Colombia transitions to peace, the United States will work with you, hand-in-hand. I’m proposing that more than \$450 million be devoted to helping to reinforce security gains, reintegrate former combatants into society, and extend opportunity and the rule of law into areas denied them for decades. We will continue to stand for human rights and justice for victims, and we will keep working to protect our people, as well as the Colombian people, from the ravages of illegal drugs and the violence of drug traffickers. And Secretary Kerry will lead this effort”.

Obama dalam pidatonya mengatakan langsung bahwa Kerry akan memimpin langsung upaya ini dengan kerangka kerja yang baru untuk membantu Kolombia mencapai perdamaian (Obama White House, 2016). Kerry membantu langsung negosiasi damai antara Kolombia dan FARC yang dilakukan dalam pertemuannya di Havana, Kuba yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Kerry mendorong kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik ini dan menjadikan hal ini prioritas utama dalam

negosiasi ini termasuk gencatan senjata yang terjadi yang diawasi oleh Dewan Keamanan PBB serta jaminan keamanan pasca konflik untuk semuanya (Brodzinsky Roberts, 2016).

Coplin mengatakan bahwa Birokrat memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi pengambil keputusan karena mereka memiliki akses langsung kepada pengambil keputusan, karena pengambil keputusan bergantung kepada mereka dalam hal informasi-informasi yang penting bagi pembuatan kebijakan serta dalam bantuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Karena pentingnya kontribusi kelompok birokratis bagi pengambil keputusan, maka dampaknya terhadap kebijakan akhir cukup substansial (W. D. Coplin, 1992).

Dapat dipahami bahwa Kerry merupakan aktor birokrat yang berpengaruh pada kebijakan ini. Kerry banyak melakukan perjalanan ke Kolombia untuk melakukan pertemuan dengan para *stakeholder* Kolombia, tentunya semua informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai landasan kebijakan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Kerry sebagai menlu menjadi penasihat utama Presiden dalam kebijakan luar negeri AS dan juga melakukan negosiasi yang berkaitan dengan urusan luar negeri, karena hal ini menurut Coplin sukar membedakan birokrat yang bertindak sebagai *policy influencers* karena mereka bergerak di balik layar untuk mensuplai informasi-informasi yang akan digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Namun Kerry menjadi *policy influencers*

dalam hal ini dikarenakan Kerry memiliki sentimen tersendiri dengan Obama, mulai dari dukungan penuh Kerry terhadap Obama dalam kampanye 2008, lalu dalam pengajuan Kerry sebagai menlu oleh Obama, dan Kerry juga dipercaya oleh Obama menjadi aktor yang memimpin langsung setelah dilakukannya transisi kebijakan dengan kerangka kerja yang baru dari “*Plan Colombia*” menjadi “*Peace Colombia*”. Selain itu, Kerry juga sering disebut sebagai utusan tidak resmi Obama dalam sejumlah kegiatan kepresidenan sebelum Kerry menjadi menlu.

3.1.2 Dominasi Partai Demokrat Terhadap Pengambilan Keputusan Kebijakan *War On Drugs*.

Pengaruh partai dalam pengambilan keputusan bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan masyarakat agar menjadi tuntutan politis, yaitu tuntutan yang diarahkan kepada pengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Influencer ini berupaya menekan penguasa agar kebijakan terpengaruh dan menyediakan anggota yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan (William D Coplin, 1992, p. 84).

Bila ditelaah melalui Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri, negara republik konstitusional seperti AS mempunyai kondisi politik dalam negeri yang cukup berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri. Dalam lembaga legislatif AS, terdapat kongres yang terbagi menjadi 100 anggota Senat dan 435 anggota *House of Representatives* (HoR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (Hamilton, 2004). Dalam aspek urusan luar negeri sendiri, Kongres AS memiliki wewenang meloloskan anggaran, membuat undang-undang, mendeklarasikan perang,

merekomendasikan kebijakan, mengatur perdagangan dengan negara lain, serta meninjau kebijakan luar negeri yang sedang berjalan.

Pada konteks kebijakan *War on Drugs* yang diterapkan kembali oleh Obama juga mendapatkan pengaruh dari *partisan influencers*, yaitu partai Demokrat. Sebagai partai pengusung Obama pada pemilu 2008, Demokrat memiliki kontrol penuh pada jajaran lembaga eksekutif dan legislatif karena memenangkan pemilu. Partai Demokrat pada jajaran kongres ke 111 pada tahun 2009 hingga 2011 menguasai mayoritas kursi dengan mendapat 57 kursi senat, sedangkan partai Republik mendapat 41 kursi dan 2 dari independen yang memihak kepada Demokrat. Sedangkan pada kursi *House of Representative*, Demokrat mendapat 257 kursi sedangkan partai Republik mendapatkan 178 kursi (Manning, 2010). Dengan adanya dominasi oleh partai Demokrat pada jajaran kongres tersebut menghasilkan sebuah legislasi undang-undang yaitu *The 2010 Affordable Care Act* yang juga dikenal dengan sebutan Obamacare. Rancangan undang-undang ini diajukan oleh Charles B. Rangel, seorang dewan perwakilan dari New York yang berasal dari partai demokrat pada September 2009. Undang-undang ini ditolak oleh 85% Republikan namun pada akhirnya tetap disahkan tahun 2010 karena partai Demokrat memiliki suara mayoritas dalam kongres (Dimock, 2017).

Sejak 1970 Demokrat banyak mengusung legislasi undang-undang dalam mengatasi masalah narkoba. Beberapa diantaranya yaitu Fair Sentencing Act of 2010 dan telah disahkan dalam kongres pada tahun

2010 yang diajukan oleh Richard J. Durbin, seorang senator Demokrat. Undang-undang ini berisikan tentang pengurangan disparitas hukuman pengguna kokain crack dan kokain bubuk yang pada awalnya 100:1 ke 18:1. Lalu pada tahun 2012 juga disahkannya Border Tunnel Prevention Act of 2012 yang bertujuan untuk mencegah pembangunan dan penggunaan terowongan di perbatasan untuk mengurangi perdagangan narkoba yang juga diajukan oleh seorang dewan perwakilan dari partai Demokrat yang bernama Silvestre Reyes meskipun pada tahun 2012 mayoritas kongres dikuasai oleh Republik (Dyer, 2016).

Bagaimana mengatasi masalah narkoba di Amerika Serikat telah menjadi isu perdebatan besar selama beberapa dekade. Hampir setiap pemerintahan telah mengubah kebijakan sebelumnya namun hanya sedikit yang menunjukkan banyak kemajuan. Partai Demokrat percaya bahwa Amerika Serikat perlu bekerja dengan "*foreign powers*" untuk mengurangi masuknya narkoba ke Amerika Serikat dan Demokrat berpendapat bahwa narkoba harus dilawan dengan pencegahan dan pengobatan, Demokrat percaya bahwa peningkatan upaya dalam bidang ini merupakan jawaban untuk mengakhiri masalah narkoba di Amerika Serikat (Republican Views, 2015).

Demokrat pada masa pemerintahan Obama mempunyai cara pandang baru yang menyatakan bahwa kecanduan merupakan penyakit bukan masalah moral oleh karena itu harus diatasi dengan pengobatan. Demokrat sangat meyakini bahwa pengobatan adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah narkoba di AS, kemudian dari situ pemerintah Obama

mengeluarkan Obamacare pada tahun 2010 sebagai reformasi kesehatan untuk masyarakat AS, meskipun mendapatkan banyak kontroversi dalam kebijakan tersebut namun tidak sedikit juga yang mendukung kebijakan itu. Obama juga mengeluarkan kebijakan untuk memotong masa tahanan disparitas rasial atas kepemilikan narkoba pada masa pemerintahannya yang juga sesuai dengan apa yang dipercayai partainya dalam mengatasi masalah narkoba dengan tidak memberatkan dengan hukuman namun difokuskan dalam pencegahan dan pengobatan para pecandu. Dapat dipahami bahwa beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Obama mendapatkan pengaruh dari partainya, yaitu partai Demokrat.

3.1.3 Pengaruh Community Anti Drug Coalition of America (CADCA) Sebagai *Interest Influencer* Terhadap Kebijakan *War On Drugs*.

Interest influencer dijelaskan oleh Coplin sebagai sekelompok individu yang berkumpul karena serangkaian kepentingan bersama, namun belum cukup besar sampai bisa di sebut sebagai partai, namun kelompok individu ini sangat di butuhkan guna memberikan sumber-sumber untuk mendapat dukungan policy influencer atau para pengambil keputusan yang lain (William D Coplin, 1992, p. 87).

Community Anti Drug Coalition of America (CADCA) merupakan organisasi non-profit yang berfokus kepada pencegahan penyalahgunaan narkoba secara global yang didirikan sejak 1992. CADCA banyak menggandeng komunitas yang ada di seluruh dunia dan melakukan kerjasama untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba secara global

yang berfokus kepada remaja. Kerjasama yang dilakukan oleh CADCA tidak hanya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh remaja, mereka juga memiliki program kerjasama edukasi untuk anak-anak mengenai tembakau, alkohol, dan narkoba (Cadca, 2015).

Pada kongres ke-112 yang digelar oleh Komite Hubungan Luar Negeri Senat Amerika Serikat dengan topik “A *SHARED RESPONSIBILITY: COUNTERNARCOTICS AND CITIZEN SECURITY IN THE AMERICAS*” disebutkan bahwa Komunitas yang kuat dan tangguh menjadi salah satu strategi terhadap implementasi dari kebijakan untuk mengontrol narkoba. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan untuk membangun komunitas yang kuat untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya dukungan ini, CADCA difokuskan untuk menyediakan pelatihan dan bantuan teknis kepada organisasi non-*profit* yang bergerak pada bidang yang sama untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba (Foreign Relation Comitee Senate, 2011). CADCA sudah melakukan pelatihan dan memberikan bantuan teknis kepada MENTOR dan SURGIR yang merupakan organisasi non-*profit* asal Kolombia yang bergerak pada bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba (Cadca, 2015).

Office of National Drug Control Policy (ONDCP) melalui *Drug Free Community (DFC) support program* memberikan pendanaan untuk mendukung komunitas yang berbasis pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ketua ONDCP pada saat itu menyatakan bahwa melakukan pencegahan penggunaan narkoba sebelum terjadi merupakan pendekatan

yang paling efektif dan memakan biaya yang rendah untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba (Obama White House, 2015). Tujuan utama *DFC Support Program* adalah untuk memperkuat kolaborasi dalam entitas masyarakat dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Dukungan keuangan ini diperlukan guna meningkatkan pendanaan komunitas untuk melakukan berbagai strategi untuk pemecahan masalah penyalahgunaan narkoba oleh remaja (Obama White House, 2013).

Ketua ONDCP pada salah satu forum yang diadakan oleh *National Press Club* yang juga dihadiri oleh ketua CADCA, menyatakan bahwa mereka bangga telah bekerja sama dengan CADCA. Dalam pidatonya ia juga mengatakan bahwa CADCA bekerja dengan pengetahuan bahwa pencegahan merupakan cara terbaik untuk mengurangi penggunaan narkoba dan menghentikan berkembangnya gangguan kecanduan terutama terhadap remaja. CADCA telah melakukan reformasi sesungguhnya terhadap kebijakan narkoba dengan mempromosikan pencegahan penggunaan narkoba secara inovatif, dengan solusi yang disesuaikan dan juga memberikan pesan. CADCA telah memberikan pelatihan kepada komunitas lokal, bahkan dalam level paling dasar CADCA telah berhasil memberdayakan kaum muda untuk membuat keputusan dan berfikir tentang masa depan mereka (Obama White House, 2013).

Menurut Coplin, Interest Influencer merupakan faktor yang cukup penting dalam proses penyusunan politik luar negeri karena mereka mempengaruhi kompleksitas proses politik dalam negeri. Influencer ini

mungkin tidak dapat mendikte politik luar negeri suatu negara, namun mereka pasti berperan dalam perhitungan para pengambil keputusan politik luar negeri (W. D. Coplin, 1992, hal. 88). CADCA menaruh perhatian terhadap masalah penyalahgunaan narkoba yang hadir di berbagai negara di dunia. CADCA menjadi penting karena CADCA memiliki tujuan untuk membangun dan memperkuat kapasitas koalisi komunitas masyarakat melalui pelatihan, edukasi dan advokasi kebijakan publik, strategi media, konferensi internasional dan kegiatan lainnya untuk memberdayakan masyarakat dalam hal penyelesaian masalah narkoba.

Melihat peran CADCA yang semakin masif yang kemudian menjadi bentuk koalisi masyarakat dan advokasi dalam permasalahan narkoba yang kemudian menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat, apa yang dilakukan oleh CADCA memiliki dampak yaitu mempengaruhi kompleksitas dalam proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah Amerika Serikat, dengan adanya perhatian pemerintah terhadap CADCA menunjukkan bahwa secara tidak langsung CADCA telah mempengaruhi kompleksitas politik dalam negeri Amerika. Dari pengaruh tersebut, CADCA telah berperan dalam mempengaruhi pengambil keputusan yang dibuktikan dengan pemerintah Amerika Serikat menjadikan CADCA sebagai salah satu strategi untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mengontrol narkoba.

Seperti halnya yang disebutkan oleh Coplin *interest influencer* adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dan dapat digunakan dalam memberi dukungan terhadap pemerintahan. CADCA

maupun Obama memiliki kepentingan yang sama dalam hal memerangi narkoba, oleh karena itu secara tidak langsung CADCA mendukung sekaligus memiliki pengaruh terhadap kebijakan *War on Drugs* pada era Obama.

3.1.4 Pengaruh *Mass Influencers* Terhadap Pengambilan Keputusan Kebijakan *War On Drugs*.

Tipe *policy influencers* ini mengacu pada iklim opini masyarakat yang dimiliki suatu populasi dalam negara yang nantinya akan dijadikan pertimbangan oleh para pengambil keputusan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Dalam negara demokrasi, masyarakat menerima banyak informasi dari berbagai sumber, seperti pers, penyiaran lewat televisi, dan penyiaran radio menjadi penyaji banyak informasi. Melalui penyebaran informasi tersebut tercipta sebuah iklim opini pada masyarakat, yang artinya opini publik dapat dibentuk oleh media massa yang nantinya dapat digunakan oleh para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan luar negeri atau mendukung keputusannya. Opini publik atau *mass influencers* memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara karena para pengambil keputusan akan memperhitungkan opini publik untuk membuat kebijakan. Selain itu, opini publik juga digunakan untuk merasionalisasi tindakan-tindakan politik luar negeri (W. D. Coplin, 1992, hal. 88).

Dalam konteks kebijakan *War on Drugs* pada masa pemerintahan Obama mayoritas masyarakat Amerika Serikat memandang bahwa *War on Drugs* tidak bermanfaat. Menurut survey dari Rasmussen Report pada

2012, hanya 10% masyarakat dewasa AS yang percaya bahwa “*War on Drugs*” yang menggambarkan upaya pemerintah AS dalam mengurangi perdagangan obat-obatan terlarang telah berhasil (Riggs, 2012).

Menurut Coplin, para pengambil keputusan tentu memerlukan mass influencers dalam merumuskan suatu kebijakan karena mereka memiliki peran pada pemilu. Formulasi-formulasi kebijakan yang akan dibentuk oleh para pengambil keputusan semakin relevan apabila pemilu telah mendekati waktunya, karena informasi tersebut akan memberikan bukti-bukti penting dalam membuat prediksi tentang hasil pemilu. Namun dengan adanya peran opini publik dalam perumusan kebijakan luar negeri oleh para pengambil keputusan bukan berarti mereka dikontrol oleh opini publik (W. D. Coplin, 1992, hal. 88).

Meskipun mayoritas masyarakat dewasa AS memandang kebijakan *War on Drugs* pada masa pemerintahan Obama tidak bermanfaat, hal ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada pemilu, yang terbukti dengan kemenangan yang diraih kembali oleh Obama pada pemilu 2012 dan Obama tetap menjalankan kebijakan *War on Drugs* dengan beberapa transformasi yang dilakukannya pada kebijakan tersebut.

Menurut survei nasional dari *Pew Research Center* pada 2014, 2 dari 3 orang Amerika yang artinya 63% orang Amerika berfikir bahwa kepemilikan atas narkoba seperti kokain dan heroin tidak harus dihukum penjara dan 54% orang amerika mendukung legalisasi ganja yang bahkan meningkat hingga 60% pada tahun 2016 (Pew Research Center, 2014).

Artinya pandangan publik terhadap legalisasi ganja terus meningkat pada masa pemerintahan Obama, tetapi Obama tetap tidak mengabdikan keinginan masyarakatnya dengan tidak melegalkan ganja sampai ke pemerintah federal namun Obama menyerahkannya pada negara bagian yang lebih mengerti masyarakatnya terkait legalisasi ganja ini, contohnya adalah Colorado dan California yang sudah melegalkan ganja untuk rekreasi yang telah diatur oleh pemerintahan negara bagiannya. Sedangkan untuk kepemilikan narkoba seperti kokain dan heroin, pemerintahan Obama melakukan pemotongan masa hukuman bagi pengguna biasa yang tidak memiliki keterkaitan dengan kriminalisasi lainnya yang setelah itu diberikan edukasi serta pengobatan setelah menjalani masa hukuman (Hollingsed, 2019).

Terkait dengan pemotongan masa hukuman atas kepemilikan narkoba seperti heroin dan kokain, hal tersebut juga pernah dikritik sebelumnya oleh Ethan Nadelmann, seorang pendiri NGO bernama *Drug Policy Alliance* (DPA) yang bergerak untuk mengupayakan pengurangan peran kriminalisasi dalam kebijakan perihal narkoba, mengadvokasi regulasi hukum ganja, dan mempromosikan kebijakan narkoba yang berpusat pada kesehatan. Ethan Nadelmann berpendapat bahwa pemerintah harus menghapus hukuman wajib minimum lima tahun terhadap kepemilikan narkoba seperti kokain dan heroin (Nadelmann, 2014). Pemerintahan Obama menjawab dengan menghapus hukuman wajib minimum pada kepemilikan narkoba seperti kokain dan heroin sekaligus melakukan pemotongan hukuman bagi pengguna biasa

(Hollingsed, 2019). Hal yang dilakukan oleh Obama ini juga sejalan dengan orang-orang demokrat yang berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah narkoba di AS adalah dengan pencegahan dan pengobatan yang tidak menitikberatkan pada hukuman.

Menurut Coplin, dalam negara demokrasi, masyarakat menerima banyak informasi dari berbagai sumber, seperti pers, penyiaran lewat televisi, dan penyiaran radio menjadi penyaji banyak informasi. Melalui penyebaran informasi tersebut tercipta sebuah iklim opini pada masyarakat, yang artinya opini publik dapat dibentuk oleh media massa yang nantinya dapat digunakan oleh para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan luar negeri atau mendukung keputusannya. Dalam hal ini, program *Plan Colombia* yang tetap dilanjutkan oleh Obama banyak mendapatkan kritik dari media massa seperti BBC yang menyebutkan bahwa apakah *Plan Colombia* benar-benar berhasil karena banyak terjadi pelanggaran HAM, meningkatnya jumlah korban karena konflik yang terjadi di internal, dan berhentinya tentara Kolombia untuk menjadi tentara bayaran. Lalu, kritik menurut Aljazeera AS harus menghindari pengulangan yang terjadi pada *Plan Colombia* dan pemerintah harus secara kritis menilai efek berbahaya dari program tersebut dan sudah harus mengadopsi pendekatan non-militer yang dirancang untuk membangun kembali negara tersebut. Menurut Coplin dalam bukunya dengan menyatakan bahwa para pengambil keputusan memperhitungkan opini publik bukan berarti mereka dikontrol oleh opini tersebut. Kritik ini berusaha untuk mempengaruhi keputusan pembuat

kebijakan yang mengacu kepada pendapat masyarakat, namun iklim opini yang terbentuk melalui media massa ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi pengambil keputusan.

Tabel 1. Pengaruh *Policy Influencers* dalam Kebijakan *War on Drugs*.

Policy Influencers	Aplikasi Teori
Bureaucratic Influencers	Kerry merupakan Ketua Komite Senat untuk Urusan Luar Negeri Amerika Serikat pada 2009 hingga 2013 lalu Kerry melanjutkan karirnya menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke-68 yang diajukan ke Senat oleh Obama untuk menggantikan Hillary Clinton dan ia dilantik pada 1 Februari 2013. Kerry menjadi birokrat yang berpengaruh karena ia berperan dalam memberikan informasi kepada Obama. Kerry juga ditunjuk langsung oleh Obama untuk memimpin “ <i>Peace Colombia</i> ” sebagai upaya AS dalam membantu Kolombia untuk mencapai perdamaian dengan kelompok pemberontak demi mencapai tujuan AS dalam menangani permasalahan narkoba.
Partisan Influencers	Demokrat sebagai partai pendukung Obama memiliki kontrol penuh atas lembaga legislatif maupun eksekutif karena memenangkan pemilu. Sejak 1970, banyak Undang-Undang perihal narkoba yang telah disahkan oleh senat yang diusung oleh Demokrat. Demokrat memiliki kepercayaan sendiri dalam mengatasi permasalahan narkoba yaitu dengan pencegahan dan pengobatan bukan dengan hukuman. Obama melakukan pemotongan masa hukuman bagi para pecandu dan menghapus hukuman minimum terhadap kepemilikan narkoba yang mana hal ini sejalan dengan kepercayaan partainya bahwa permasalahan narkoba dapat diatasi dengan tidak menitikberatkan pada hukuman.
Interest Influencers	CADCA berfokus pada pencegahan penggunaan narkoba dan memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan <i>War on Drugs</i> yaitu memerangi narkoba. CADCA telah berperan dalam mempengaruhi kompleksitas pengambil keputusan yang dibuktikan

	dengan pemerintah Amerika Serikat menjadikan CADCA sebagai salah satu strategi dalam mengimplementasikan kebijakan untuk mengontrol narkoba. Selain itu, perhatian pemerintah AS yang ditaruh kepada CADCA dengan memberikan bantuan dana juga menjadi bukti lainnya bahwa CADCA telah berperan dalam mempengaruhi kompleksitas pengambil keputusan.
Mass Influencers	Obama melakukan tranformasi pada kebijakan <i>War on Drugs</i> dengan memotong masa hukuman para pengguna biasa yang tidak terlibat kriminalisasi lainnya dan menghapus hukuman wajib minimum 5 tahun atas kepemilikan narkoba seperti kokain dan heroin yang mengacu kepada opini publik yang dimana menurut survey nasional dari Pew Research Center bahwa 63% orang Amerika berfikir bahwa kepemilikan narkoba seperti kokain dan heroin tidak harus dihukum penjara.

3.2 Pengaruh Ekonomi dan Militer Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat.

Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika ia menyusun politik luar negeri. Pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer (W. D. Coplin, 1992).

Dalam sub bab ini akan menelaah peran ekonomi dan militer terhadap kebijakan luar negeri, sejumlah kriteria bisa membantu kita untuk menaksir kekuatan dan kelemahan ekonomi dan militer suatu negara tertentu. Dari segi dimensi ekonomi, terdiri dari dua hal (1) kapasitas produksi barang dan jasa (2) kebergantungan perdagangan dan finansial internasional. Dari segi militer, terdiri dari dua hal ; (1) Kapasitas Penggunaan Kekuatan Militer (2) Ketakstabilan

Internal dan Kemampuan Militer (W. D. Coplin, 1992).

Para ekonomi mengembangkan konsep Gross National Product (GNP) untuk mengukur nilai seluruh seluruh barang dan jasa yang di produksi oleh suatu negara dalam satu tahun, negara dengan GNP perkapita tinggi dan aktif dalam perdagangan internasional dapat memengaruhi negara dengan GNP perkapita dibawahnya. Karena negara tersebut dapat dengan mudah memberikan ancaman dengan menolak investasi hingga memblokade negara-negara dibawahnya (W. D. Coplin, 1992).

Pada konteks kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mengatasi peredaran narkotika di negaranya pada masa pemerintahan Barack Obama tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan militer yang menjadi pertimbangan atas perumusan kebijakan tersebut. Amerika Serikat merupakan negara adikuasa karena memiliki kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Menurut data dari *International Monetary Fund* (IMF) Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat pada 2016 mencapai 18,7 triliun USD dengan pertumbuhan rata-rata 2% per tahunnya sejak 2010. Amerika Serikat menjadi negara dengan kondisi ekonomi tertinggi sejak tahun 1960 (IMF, 2022).

Dalam berhubungan dengan negara maju, kondisi ekonomi internasional Amerika sudah sangat kuat. Kondisi ini berawal dari kondisi setelah perang dunia ke II ketika Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara maju yang sistem ekonominya tidak rusak. Melalui Marshall Plan, Amerika Serikat mulai menjalankan kontrol ekonomi yang sangat luas terhadap negara-negara maju di Eropa. Besarnya investasi luar negeri para pengusaha Amerika Serikat juga memberikan pengaruh yang besar dalam sistem ekonomi negara-negara maju.

Selain itu, kebijakan moneter Amerika Serikat membuat dolar menjadi alat tukar internasional (W. D. Coplin, 1992, hal. 138).

Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh Amerika Serikat, Kolombia mendapat investasi terhitung besar berasal dari Amerika Serikat, hal ini bisa dilihat bahwa Amerika Serikat menjadi negara yang menjadi investor terbesar kepada Kolombia dengan akumulasi investasi asing dengan senilai US \$ 39,19 miliar dari tahun 2000 sampai 2019, menurut bank sentral. Menurut lembaga ProColombia, lebih dari 500 perusahaan dari Amerika Serikat yang beroperasi di Kolombia, yang dimana berfokus pada sektor-sektor pada manufaktur, agribisnis, bahan kimia dan ilmu kehidupan, industri 4.0, produksi pakaian, serta bisnis dan layanan keuangan. Dengan demikian Kolombia memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat dari segi perdagangan dan *financial international* (United States Agency for International Development, 2016).

Pada dimensi militer sendiri, menurut Global Firepower Ranks, AS konsisten menduduki peringkat satu sebagai negara dengan kekuatan militer terbaik dari tahun 2005-2021 mengalahkan Rusia dan Tiongkok (Ranks, 2022). Pada tahun 2015, sektor kekuatan militer Amerika Serikat menjadi yang terkuat selama lebih dari satu dekade, kekuatan militer yang kuat ini didukung dengan anggaran yang besar, dengan taksiran mencapai 581 juta USD, oleh karena besarnya kekuatan militer Amerika Serikat, mereka memiliki peran penting terhadap keamanan dunia. Pada era Obama kekuatan militer Amerika Serikat melakukan perluasan dengan menggandeng negara-negara di asia pasifik seperti Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Singapura sebagai bagian dari kebijakan Asia Pivot (Taylor, 2011, p. 1).

Dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat, mereka sering melakukan intervensi militer ke negara lain, meski tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB tanpa harus takut dengan konsekuensi yang akan terjadi untuk kepentingan AS sendiri. Misalnya intervensi yang dilakukan Amerika Serikat pada tahun 2003 terhadap Irak dan bantuan militer Amerika Serikat untuk Perancis dalam misi operasi militer di Libya. Selain itu, Amerika Serikat juga memberikan bantuan militer kepada Kolombia pada tahun 2001 - 2008 untuk mengatasi permasalahan peredaran narkoba di negara Kolombia. Lalu, pada tahun 2009 kembali disepakati dalam perjanjian *Defense Cooperation Agreement* (DCA) antara AS dan Kolombia untuk memperpanjang penggunaan tujuh pangkalan militer di Kolombia oleh AS namun tidak diperbolehkan untuk mendirikan pangkalan militer AS di Kolombia. Perjanjian ini memfasilitasi akses militer AS ke tiga pangkalan angkatan udara Kolombia yang berada di Palanquero, Apiay, dan Malambo serta mengizinkan akses ke dua pangkalan laut dan dua pangkalan instalasi tentara tetapi untuk akses berkelanjutan militer AS ke fasilitas khusus Kolombia harus disepakati untuk melakukan kegiatan bersama di Kolombia. Perjanjian ini memberikan akses militer AS ke pangkalan di Kolombia akan tetapi kontrol, komando, dan keamanan akan tetap di bawah kendali Kolombia dan semua aktivitas yang akan dilakukan oleh militer AS harus disepakati bersama sebelumnya. Kehadiran militer AS di Kolombia tidak akan meningkat jumlahnya dan akan tetap sesuai dengan amanat kongres yaitu 800 personil tentara maupun anggota departemen pertahanan serta 600 *civilian military contractors* yang semuanya memiliki kekebalan hukum atau kekebalan terhadap tuntutan pidana di Kolombia (U.S Department of State, 2009). DCA

akan memfasilitasi kerja sama bilateral dalam masalah keamanan di Kolombia termasuk produksi dan perdagangan narkoba, terorisme, dan kelompok bersenjata ilegal lainnya di Kolombia. Akses yang diberikan Kolombia ke militer AS dalam tujuh pangkalan juga bertujuan untuk meningkatkan operasi kontranarkoba dan kontraterorisme yang juga termasuk membantu pasukan Kolombia dalam pelatihan, dukungan logistik dan intelijen (Boadle, 2009). Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat menjadi bukti bahwa dengan adanya ekonomi dan militer yang kuat dapat menjadikan suatu negara aktif dalam politik internasional untuk mencapai suatu kepentingan.

Menurut Coplin dengan adanya kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tersebut akan aktif dalam politik internasional. Dengan kata lain kemampuan ekonomi dan militer suatu negara akan memengaruhi posisi tawar di mata negara lain. Kemampuan tersebut juga dapat memengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan kepada negara lain. Sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara (W. D. Coplin, 1992).

Pada kebijakan *War on Drugs* pada masa pemerintahan Obama dengan kekuatan ekonomi dan militernya, Amerika Serikat masih memberikan bantuan militer kepada Kolombia untuk mengatasi masalah narkoba di negara Kolombia sebagai upaya untuk mengurangi produksi kokain dan membendung aliran obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat. Amerika Serikat juga diberikan akses ke tujuh pangkalan militer yang ada di Kolombia untuk meningkatkan operasi kontranarkoba dan kontraterorisme di Kolombia dalam perjanjian DCA antara AS dan Kolombia. Lalu, pemerintah AS memberikan bantuan dana sebesar \$513

juta pada tahun 2010 yang dialokasikan untuk program *Plan Colombia*. Pada tahun 2016 dalam pembaharuan kerangka kerja “*Plan Colombia*” yang dipimpin Kerry, Amerika Serikat kembali memberikan bantuan dana sebesar 450 juta USD untuk mendukung upaya pemberantasan narkotika di Kolombia. Upaya ini dilakukan untuk mencapai tujuan Amerika Serikat dalam menangani permasalahan narkotika di negaranya. Dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dilakukan oleh Obama tidak terlepas dari bagaimana kondisi ekonomi dan militer negaranya.

Tabel 2. Pengaruh Ekonomi & Militer terhadap Kebijakan *War on Drugs*.

Pengaruh	Aplikasi Teori
<p>Ekonomi</p>	<p>Kebijakan <i>War on Drugs</i> pada masa pemerintahan Obama dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh AS. AS memberikan bantuan dana sebesar \$513 juta pada tahun 2010 yang dialokasikan untuk program <i>Plan Colombia</i>. Pada tahun 2016 dalam pembaharuan kerangka kerja “<i>Plan Colombia</i>” yang dipimpin Kerry, Amerika Serikat kembali memberikan bantuan dana sebesar 450 juta USD untuk mendukung upaya pemberantasan narkotika di Kolombia. Upaya ini dilakukan untuk mencapai tujuan Amerika Serikat dalam menangani permasalahan narkotika di negaranya.</p>

Militer	Pada masa pemerintahan Obama dengan kekuatan militernya, Amerika Serikat masih memberikan bantuan militer kepada Kolombia untuk mengatasi masalah narkotika di negara Kolombia sebagai upaya untuk mengurangi produksi kokain dan membendung aliran obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat. Amerika Serikat juga diberikan akses ke tujuh pangkalan militer yang ada di Kolombia untuk meningkatkan operasi kontranarkotika dan kontraterorisme di Kolombia dalam perjanjian DCA antara AS dan Kolombia.
----------------	--

3.3 Pengaruh Konteks Internasional dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kolombia

Konteks Internasional memiliki tiga hal penting yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri suatu negara yaitu geografis, ekonomi dan politis. Konteks internasional merupakan sesuatu hal yang terjadi di luar negara dan diluar dari kontrol negara. Faktor geografi sendiri merupakan keterkaitan baik dalam hal politis maupun ekonomi dari negara-negara dalam lingkup geografi yang sama sedangkan faktor ekonomi dipandang arus barang dan jasa yang memengaruhi ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya sehingga turut memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan politik luar negeri (W. D. Coplin, 1992).

Konteks Internasional secara geografis memainkan peran penting dalam politis maupun ekonomi dari negara-negara dalam lingkup geografi. Secara geografis Amerika Serikat dan Kolombia berada dalam satu benua Amerika. Amerika Serikat dan Kolombia mempunyai hubungan bilateral yang dekat dan strategis. Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang berada di kawasan

Amerika Utara yang membentang dari Laut Atlantik di timur hingga Laut Pasifik di Barat. Sedangkan Kolombia merupakan negara yang berada di wilayah barat laut kawasan Amerika Selatan dengan 72% wilayahnya berupa hutan. Tahun 1920 menjadi bukti kedekatan hubungan Kolombia dengan Amerika Serikat dimana Presiden Kolombia pada saat itu Marco Fidel Suarez menyatakan suatu doktrin yang disebut dengan “*Res Pice Polum*” (Ikuti Bintang Utara), yakni suatu doktrin yang menghubungkan ikatan takdir Kolombia dari “Bintang Utara” dengan Amerika Serikat yang berdasarkan kepada geografi, perdagangan, dan demokrasi (Márquez, 2009). Amerika Serikat dan Kolombia memperkuat kerja sama keamanan dalam kesepakatan SACTA (*Supplement Agreement for Cooperation and Technical Assistance and Security*) yang bertujuan untuk melakukan pemantauan, pelacakan dan mencegah kegiatan perdagangan narkoba antara Kolombia dan Amerika Serikat, melalui berbagai rute yang digunakan oleh kartel obat dalam menyediakan perlengkapan dan tempat produksi akhir di pasar (U.S Department of State, 2009).

Hubungan Internasional secara ekonomi juga penting, baik arus barang dan jasa maupun modal, sehingga membuat ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya (W. D. Coplin, 1992). Amerika Serikat dan Kolombia melakukan hubungan bilateral dengan melakukan ekspor dan impor. Kolombia bergantung kepada AS dalam hal ekspor kopi dikarenakan AS merupakan sumber pendapatan utama ekspor kopi bagi Kolombia. Amerika Serikat juga melakukan investasi ke Kolombia dengan tujuan membuka lapangan kerja untuk masyarakat lokal Kolombia. Amerika Serikat melakukan program untuk menangani masalah ekonomi Kolombia dengan peran *United States Agency for International*

Development (USAID) untuk membantu pemerintah Kolombia memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk bersaing dan kemudian mengelola dana masyarakat publik Kolombia yang tersedia untuk proyek infrastruktur produktif dan termasuk infrastruktur jalan (United States Agency for International Development, 2016).

Amerika Serikat dan Kolombia juga melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi melalui *U.S.- Colombia Trade Promotion Agreement* (CTPA) yang mulai berlaku pada tahun 2012. Perjanjian perdagangan ini memperluas ekspor barang AS lebih dari 1.1 miliar USD per tahunnya dan sejak berlakunya perjanjian perdagangan ini berhasil meningkatkan ekspor AS ke Kolombia sebesar 13,8% dan investasi asing AS di Kolombia meningkat sebesar 30,3% pada akhir tahun 2014. Pertumbuhan ini telah menciptakan lapangan kerja di kedua negara dan membantu bisnis kecil sampai bisnis internasional (Obama White House, 2014).

Selain itu, pada tahun 2010 melalui program *Plan Colombia*, Amerika Serikat memberikan bantuan dana kepada Kolombia sebesar \$513 juta untuk keperluan Kolombia dalam mereduksi pasokan narkoba di negaranya. Melalui program *Plan Colombia* ini dapat dilihat peningkatan ketergantungan antara pemerintah Kolombia terhadap Amerika Serikat dikarenakan bantuan yang terus menerus diberikan oleh Amerika Serikat meskipun bantuan tersebut diberikan demi kepentingan AS sendiri sehingga menjadikan pemerintah Kolombia memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Kolombia dalam program *Plan Colombia* ini mengalami kegagalan yang disebabkan oleh dua faktor. Pertama, adanya permasalahan laten pada negara penerima, dalam kasus ini Kolombia memiliki permasalahan dalam

penegakan hukum yang disebabkan karena adanya subordinasi hukum dan lemahnya penegakan hukum di Kolombia. Faktor kedua, adanya misdiagnosa strategi yang dialami oleh Amerika Serikat selama pembentukan strategi program *Plan Colombia*. Tumpang tindih penentuan prioritas target sasaran operasi dari *war on drugs* disebabkan karena adanya keterkaitan antara kelompok penyelundup narkoba dengan kelompok pemberontak (Aryadevi, 2016).

Dikarenakan adanya misdiagnosa strategi yang dialami oleh Amerika Serikat sehingga terjadi tumpang tindih penentuan prioritas target sasaran operasi *war on drugs* dalam skema *Plan Colombia* akhirnya membuat AS melakukan transisi kebijakan dalam perayaan 15 tahun *Plan Colombia*. Pada saat perayaan itu, presiden Kolombia mengunjungi gedung putih pada tahun 2016, dalam pertemuan ini Barack Obama mengeluarkan transisi kebijakan terhadap *Plan Colombia* menjadi *Peace Colombia* dan dengan kerangka kerja yang baru. Pada pertemuan ini juga dinyatakan bahwa dalam kerangka kerja *Plan Colombia* yang baru, pemerintah AS memberikan bantuan dana sebesar \$450 juta untuk upaya ini. Dalam upaya ini, pemerintah AS membantu langsung negosiasi damai antara Kolombia dan pihak FARC yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Negosiasi langsung ini dilaksanakan secara tertutup di Havana, Kuba yang pada saat itu pemerintah AS diwakili oleh menlunya John Kerry yang juga merupakan pemimpin transisi kebijakan *Plan Colombia* dengan kerangka kerja yang baru. Pemerintah AS melalui Kerry menyatakan bahwa mereka mendorong kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik dan menjadikan hal ini prioritas utama dalam negosiasi. Pemerintah Amerika Serikat telah melakukan dukungan yang luar biasa untuk upaya perdamaian antara Kolombia dan FARC bahkan Obama juga

telah meminta kongres untuk mendukung keamanan pasca konflik untuk semuanya termasuk aktor politik dengan mengeluarkan \$450 juta (Brodzinsky Roberts, 2016).

Secara politis, pemerintah Amerika Serikat sangat mendukung penuh upaya perdamaian antara Kolombia dengan kelompok gerilyawan FARC dengan menjadi mediator melalui negosiasi langsung yang dilakukan di Havana, Kuba. Amerika Serikat sangat mendukung upaya Kolombia untuk melakukan perdamaian dengan kelompok gerilyawan FARC dikarenakan mereka mempunyai peran besar atas kontrol perdagangan dan peredaran narkoba yang ada di Kolombia untuk mencapai tujuan AS dalam menangani permasalahan narkoba yang ada di Amerika Serikat. Pemerintah AS melakukan dukungan ini untuk membatasi produksi kokain dan membendung aliran obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat (COHA, 2009). FARC telah ditetapkan sebagai daftar teroris oleh Amerika Serikat sejak 1997 dan banyak para anggotanya yang sudah didakwa di Amerika Serikat dengan dakwaan perdagangan narkoba dan terorisme. Pemerintah AS menyatakan akan mempertimbangkan untuk menghapus kelompok FARC dari daftar teroris setelah melucuti senjata mereka pasca konflik dengan pemerintah Kolombia dan juga berhenti menimbulkan resiko atas kepentingan AS (Brodzinsky Roberts, 2016).

Tabel 3. Penerapan Konteks Internasional dalam Hubungan AS-Kolombia

Konteks Internasional	Penerapan Hubungan AS-Kolombia
Geografis	Amerika Serikat dan Kolombia berada dalam satu benua Amerika. Amerika Serikat merupakan sebuah negara yang berada di kawasan Amerika Utara yang membentang dari Laut Atlantik di timur hingga Laut Pasifik di Barat. Sedangkan Kolombia merupakan

	<p>negara yang berada di wilayah barat laut kawasan Amerika Selatan dengan 72% wilayahnya berupa hutan. Amerika Serikat dan Kolombia mempunyai hubungan bilateral yang dekat dan strategis. Amerika Serikat dan Kolombia memperkuat kerja sama keamanan di kawasan dalam kesepakatan SACTA.</p>
Ekonomis	<p>Secara ekonomis, melalui program <i>Plan Colombia</i> ini dapat dilihat peningkatan ketergantungan antara pemerintah Kolombia terhadap Amerika Serikat dikarenakan bantuan yang terus menerus diberikan oleh Amerika Serikat meskipun bantuan tersebut diberikan demi kepentingan AS sendiri sehingga menjadikan pemerintah Kolombia memiliki ketergantungan terhadap Amerika Serikat</p>
Politik	<p>Secara politis, pemerintah Amerika Serikat sangat mendukung penuh upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kolombia dengan kelompok gerilyawan FARC melalui negosiasi langsung yang dilakukan di Havana, Kuba. Pemerintah AS mendorong kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik dan menjadikan hal ini prioritas utama dalam negosiasi. Pemerintah AS melakukan dukungan ini dikarenakan FARC mempunyai peran besar atas kontrol perdagangan dan peredaran narkoba yang ada di Kolombia demi mencapai tujuan AS dalam menangani permasalahan narkoba yang ada di Amerika Serikat</p>

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Diterapkannya kembali kebijakan *War on Drugs* oleh pemerintahan Obama yang pada masa pemerintahan sebelumnya dianggap gagal dipengaruhi oleh beberapa *policy influencers*, dalam politik domestik sendiri terdapat empat faktor yaitu *bureaucratic influencers*, *partisan influencers*, *interest influencers*, dan *mass influencers*. John Kerry merupakan aktor penting dalam menjadi *bureaucratic influencers*, selain memiliki kedekatan dengan Obama karena mereka berangkat dari partai yang sama, Kerry menjadi utusan dalam urusan kerjasama yang dilakukan oleh AS dan Kolombia sekaligus menjadi informan penting bagi Obama yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai landasan bagaimana AS harus bersikap terhadap Kolombia. Kerry juga menjadi pemimpin yang langsung ditunjuk oleh Obama dalam kebijakan *Plan Colombia* yang bertransisi ke *Peace Colombia*. Partai Demokrat sebagai partai yang mendukung Obama menjadi *partisan influencer* karena memiliki kontrol penuh atas lembaga legislatif dan eksekutif karena memenangkan pemilu. Selain itu, beberapa transformasi dalam kebijakan *War on Drugs* yang dilakukan oleh Obama juga mendapatkan pengaruh atas dorongan partainya. CADCA menjadi *interest influencers* yang berperan sebagai komunitas progresif dalam memerangi narkoba yang juga sejalan dengan tujuan kebijakan *War on Drugs* berhasil mempengaruhi kompleksitas politik domestik AS yang dibuktikan dengan diberikannya dana bantuan yang cukup besar untuk pengembangan komunitas ini dan dijadikannya komunitas ini sebagai salah satu strategi terhadap implementasi dari kebijakan

War on Drugs. Opini publik sendiri berperan sebagai pemicu dilakukannya beberapa transformasi dalam kebijakan *War on Drugs* pada masa pemerintahan Obama yang menjadi jawaban atas ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan itu sebelumnya.

Pada faktor kapabilitas ekonomi dan militer sendiri, Amerika Serikat memanfaatkan kekuatan sebagai pemegang ekonomi dan militer terkuat di dunia dengan memberikan bantuan kepada Kolombia untuk memberantas narkotika di negaranya guna mencapai tujuan Amerika Serikat sendiri untuk mengurangi peredaran dan membendung masuknya narkotika ke AS. Dalam konteks internasional, secara geografis Amerika Serikat dan Kolombia melakukan kerjasama untuk memantau dan melacak rute perdagangan narkoba yang digunakan oleh kartel. Secara ekonomis, Amerika Serikat banyak melakukan investasi ke Kolombia yang dalam hal ini Kolombia sangat diuntungkan karena mendapat investasi dari Amerika Serikat untuk memperkuat perekonomiannya, dibalik itu AS juga memiliki kepentingan tersendiri. Amerika Serikat dan Kolombia memiliki hubungan yang cukup baik secara politik yang dapat dilihat dari banyaknya kerjasama dalam banyak sektor yang dijalin oleh kedua negara tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan kembali kebijakan *War on Drugs* yang dilakukan oleh Obama mengalami banyak transformasi yang dipengaruhi oleh *policy influencer*, mulai dari politik domestik yang terbagi dalam empat variabel yaitu *bureaucratic influencers*, *partisan influencers*, *interest influencers*, dan *mass influencers*. Transformasi yang dilakukan oleh Obama juga tidak terlepas dari bagaimana kondisi ekonomi dan militernya serta konteks

internasional yang menjadi faktor yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri.

4.2 Rekomendasi

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian pada skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik secara penulisan maupun analisis yang mungkin masih dapat disempurnakan oleh peneliti lainnya. Penelitian ini secara spesifik membahas mengapa Obama tetap menerapkan kebijakan *War on Drugs* pada masa pemerintahannya yang dipengaruhi oleh faktor politik domestik, faktor ekonomi militer, dan konteks internasional. Sebagai tindak lanjut penelitian ini, penulis memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya yang mungkin akan membahas isu yang sama dapat membahas bagaimana reformasi kebijakan *War on Drugs* yang dilakukan oleh Donald J. Trump pada masa pemerintahannya, mengingat beberapa reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Obama mendapatkan pengaruh yang cukup besar atas dorongan dari partainya dan Presiden yang menggantikan Obama yaitu Donald Trump berangkat dari partai yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- U.S Department of State. (2021, July 19). *U.S. Relations With Colombia*. Retrieved from U.S DEPARTEMENT of STATE: <https://www.state.gov/u-s-relations-with-colombia/#:~:text=Bilateral%20Economic%20Relations&text=The%20United%20States%20is%20Colombia's,totaling%20%2429.9%20billion%20in%202020>.
- Arkadiy A. Eeremin, O. K.-B. (2019). "The War on Drugs Concept as the basis for Combating Drugs on the Western Hemisphere. *Central European Journal of International and Security Studies*, 34.
- Aryadevi, C. (2016). Analisis Kebijakan War on Drugs Amerika Serikat di Kolombia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 1.
- Baum, D. (1994). *How to win the war on drugs*. New York: Harpers Magazine.
- Boadle, A. (2009). *Colombia, U.S. sign defense pact this week: minister*. London: Reuters.
- Boesche, R. (2003). Kautilya's Arthashastra on War and Diplomacy in Ancient India. *The Journal of Military History*, Vol. 67, No. 1, 18.
- Brodzinsky Roberts, S. (2016). *John Kerry hold unprecedented peace talks with colombian Farc Rebels*. Manhattan: The Guardian.
- Bureau of International Narcotics Matters, U. D. (1990). *Bureau of International narcotics control strategy*. Washinton Dc: INCSR.
- Bysyuk, V. (2010). *Impact of 9/11 Terrorist Attacks on US and International Tourism*. Wina: Modul Vienna University.
- C. A. Youngers, E. R. (2005). *The U.S. "War on Drugs": Its Impact in Latin America and the Caribbean*. United State: Lynne Rienner Publisher Inc.
- Cadca. (2015). *About Us : Cadca*. Retrieved from Cadca Web site: cadca.org/about-us
- Cadca. (2015). *International Partners Cadca*. Retrieved from Cadca Web site: <https://www.cadca.org/international-partners>
- CDC.gov. (2017, July Wednesday). *cadca.org*. Retrieved from https://www.cadca.org/sites/default/files/drug_policy_futures_paper_2017: https://www.cadca.org/sites/default/files/drug_policy_futures_paper_2017
- Check. (1995, Juni Monday). "The Successes and Failures of George Bush's War on Drugs". Retrieved from "The Successes and Failures of George Bush's War on Drugs": <http://tfy.drugsense.org/bushwar.htm>
- COHA. (2009, August 5). *Ten Years of "Plan Colombia": Bogotá Leases Military Real Estate to the Obama Administration*. Retrieved from Council of Hemispheric Affairs (COHA): <https://www.coha.org/ten-years-of-plan-colombia-bogota-leases-military-real-estate-to-the-obama-administration/>
- Coyne, C. J. (2016). The War on Drugs in Afghanistan, The Indepent Review . *Journal of Plitical Economy*, 99.
- Crandall, R. (2001). *Explicit Narcotization: US Policy toward Colombia during the Presidential*. Davidson College: Department of Political Science.
- Davenport, S. (2011). *US government's war on drugs*. London: The guardian. .
- Debusmann, B. (2012). *Obama and the failed war on drugs* . Washington: Emerging Markets.
- Democratic Party Platform. (2012). *Moving America Forward*. Retrieved from The American Presidency Project: <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/2012-democratic-party-platform>
- DFC, P. R. (2018, Mei Selasa). 2002-2018 Core Measures Data. United States, Amerika Serikat, Amerika.
- Dimock, M. (2017). *How America Changed During Barack Obama's Presidency*. Washington, D.C.: Pew Research Center.
- Domingues, J. I. (1999). *The United State and Latin America: US-Latin Americans Relations During The Cold-War And Its Aftermath*. London: Hravard University.
- Dyer, T. (2016). *The Democratic Party Policies on Substance Abuse*. Orlando: DrugRehab.Com.
- Editors, H. (2017, May). *War on Drugs*. Retrieved from History: <https://www.history.com/topics/crime/the-war-on-drugs>
- Ethics, A. (2018). *Amerika First, Colombia Second? Peace with FARC in the Age of Trump*. Amerika

- Serikat: Duke University.
- Ferreira, R. H. (2015). The war on drug addiction. *European Journal of Social Sciences*.
- Foreign Relation Comitee Senate. (2011, March 31). *A SHARED RESPONSIBILITY: COUNTERNARCOTICS AND CITIZEN SECURITY IN THE AMERICAS*. Retrieved from Foreign Relation Comitee Web site: <https://www.foreign.senate.gov/hearings/a-shared-responsibility-counternarcotics-and-citizen-security-in-the-americas>
- Fox, R. H. (1966). *Peace and War: A Theory of International Relations*. New York: Doubleday.
- Gros, A. C. (1995). *Americas Longest War Rethinking Ourtragic Crusade Againts Drugs*. New York: New York Press.
- Hamilton, L. (2004). *How Congress Works and Why You Should Care* . Indiana University Press.
- Harris, J. (1991). *Drugged America*. New York: Four Winds Press.
- Haugaard, L. A. (2005). Erasing the Lines: Trends in US Military Programs with Latin America. *Washington DC : Center for International Policy*, 47.
- Hendrix, S. (2008). The Merida Initiative for Mexico and Central America : The New Paradigm for Security Cooperation, Attacking Organized Crime, Corruption and Violence. *Loyola University Chicago International Law Review*, Vol.5, issue 2, 108.
- Herbolzheimer, K. (2016). *Innovations in the Colombian*. Norwegian: Norwegian Peacebuilding Resource Centre.
- Hollingsed. (2019). *The Drug War in America: How Much Damage*. United State of America: Georgia Southern University.
- House, W. (2009). *National Drug Control Strategy*. United State of America: The White House. Retrieved from WHITE HOUSE: <http://www.whitehouse.gov/ondcp/2013-national-drug-control-strategy>
- IMF. (2019, Desember Monday). *World Economic Outlook Database of United States* . Retrieved from World Economic Outlook Database of United States : <https://www.imf.org/en/Publications>
- IMF. (2022). *Real GDP growth* . Retrieved from International Monetary Fund: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/USA
- Issacson, A. (2005). Failing Grades:Evaluating the Result of Plan Colombia. *Yale Journal of International Affairs* , 143.
- Jensen, L. (1987). *Menjelaskan Politik Luar Negeri*. . Amerika : Prentice Hall Inc.
- Johnson, D. T. (2009, Oktober senin). *Release of 2009 International Narcotics Control Strategy Report*. Retrieved from Release of 2009 International Narcotics Control Strategy Report: <https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/rm/119890.htm>
- June S. Beittel, L. W. (2017). *Colombia's Changing Approach to Drug Policy*. America Latin: Congressional Research Service.
- Kartikasari, P. (2019). *Pengaruh Politik Luar Negeri Amerika Serikat masa Pemerintahan Obama*. Jakarta: Kabar24.
- Knapp, J. W. (2017). The War on Drugs. *Federal Senrencing Reporter*, 186-189.
- Lopez, G. (2017, January 19). *How Obama quietly reshaped America's war on drugs*. Retrieved from VOX: <https://www.vox.com/identities/2016/12/19/13903532/obama-war-on-drugs-legacy>
- Manning, J. E. (2010). *Membership of the 111th Congress: A Profile*. Congressional Research Service.
- Mark Webber, M. S. (2002). *Foreign Policy In A Transformed World*. London: Routledge.
- Márquez, H. (2009). *COLOMBIA-VENEZUELA: Conflict Heating Up - Again*. Roma: Inter Press Service.
- McCarthy, D. (2011). *The Kolombian Drug Cartel"*, In *The Economic History of Organized Crime*. New York: Routledge.
- McFarlane, J. (2001). *Transnational Crime and the Asia Pacific*. London: Rowman & Littlefield Publisher.
- Miles, H. (2014). *Aanalisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Miles, H. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nadelmann, E. (2014). *New Pew Poll Confirms Americans Ready to End War on Drugs*. New York: Drug Policy Alliance.

- Obama White House. (2012, December). *Remarks by the President at Nomination of Senator John Kerry as Secretary of State*. Retrieved from Obama White House Archive: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/12/21/remarks-president-nomination-senator-john-kerry-secretary-state>
- Obama White House. (2013, April 17). *"What Drug Policy Reform Looks Like": Director's Remarks at the National Press Club*. Retrieved from Obama White House: <https://obamawhitehouse.archives.gov/ondcp/news-releases-remarks/what-drug-policy-reform-looks-like>
- Obama White House. (2013). *Spotlight: Drug-Free Communities Support Program & Community Coalitions*. Retrieved from Obama White House Archive Web site: <https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/12/16/spotlight-drug-free-communities-support-program-community-coalitions>
- Obama White House. (2014, June). *The United States and Colombia*. Retrieved from Obama white house archive: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/06/19/fact-sheet-united-states-and-colombia>
- Obama White House. (2015, August 6). *White House Drug Policy Office Releases Promising New Data on Preventing Youth Drug Use*. Retrieved from Obama White House Archive Web site: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/08/06/white-house-drug-policy-office-releases-promising-new-data-preventing>
- Obama White House. (2016, February 4). *Remarks by President Obama and President Santos of Colombia at Plan Colombia Reception*. Retrieved from Obama White House Government Archive: <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/02/05/remarks-president-obama-and-president-santos-colombia-plan-colombia>
- Otis, J. (2014). *The Farc and Colombia's Illegal Drug Trade*. Washington DC: Wilson Center Latin American Program.
- Pennie Foster, F. d. (2015). *Evaluasi Longitudinal dari dampak Pelatihan dan TA Institut CADCA pada Efektivitas Koalisi : Melacak Koalisi DFC selama 48 Bulan Pasca Pelatihan*. United States: Michigan State University.
- Petras, J. (2000). Geopolitics of Plan Colombia. *Economic and Political Weekly*, 4617-4623.
- Pew Research Center. (2014). *America's New Drug Policy Landscape*. Washington DC: Pew Research Center.
- Poretta, D. (2004). *Usa. John Kerry sostiene il Plan Colombia, non ci sono dubbi*. ADUC - Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori.
- Quinn, A. (2015). *Obama's National Security Strategy : Predicting US*. Chatham House.
- Ranks, G. F. (2022, Agustus Selasa). <https://www.globalfirepower.com>. Retrieved from https://www.globalfirepower.com/country-military-strenght-detail.php/country_id=united-states-ofamerica: https://www.globalfirepower.com/country-military-strenght-detail.php/country_id=united-states-ofamerica
- Republican Views. (2015). *Democratic Views on Drugs*. Retrieved from REPUBLICANVIEWS.ORG: <https://www.republicanviews.org/democratic-views-on-drugs/>
- Rhodes, W. (1988-1993). *What America's User Spend on Illegal Drugs, 1988-1993, 'prepared for the Office of National Drug Control Policy*. Cambridge: AbtAssociates.
- Richard, L. B. (1989). *No Change in Basics*. New York: New York Time.
- Riggs, M. (2012). *Poll: Only 10 Percent of Americans Think the Drug War Is a Success, 66 Percent Think It's a Failure*. Los Angeles: Reason.
- Rosyidin, M. (2015). *The Power of Idea: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- S, C. A. (2016). Analisis Kebijakan War on Drugs Amerika di Kolombia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 145-146.
- Sari, D. P. (2016). Pengaruh Perubahan Orientasi Kebijakan Amerika Serikat Terhadap Perdagangan Dan Produksi Narkoba Di Kolombia Melalui Plan Colombia Tahun 2000 – 2005. *Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 3*, 32.
- STATE, U. (2020). *U.S Relations With Colombia*. California: State Government.
- State, U. D. (2021, July 19). *U.S. Relations With Colombia*. Retrieved from U.S DEPARTEMENT of

- STATE: <https://www.state.gov/u-s-relations-with-colombia/#:~:text=Bilateral%20Economic%20Relations&text=The%20United%20States%20is%20Colombia's,totaling%20%2429.9%20billion%20in%202020>.
- States., U. (2018). *Economic Report of the President Transmitted to the Congress*. California: Dept. U.S Depository.
- Taylor, C. (2011). Military Balance in Southeast Asia. *Research Paper*, 1.
- Tikkanen, A. (1998, Agustus Selasa). *Treaty of Paris*. Retrieved from Treaty of Paris: www.britannica.com/event/treaty-paris-1989.
- Treaster, J. B. (1992). *20 Years of War on Drugs, and No Victory Yet*. New York: New York Times.
- Treaster, J. B. (1992). *Four Years of Bush's Drug War: New Funds but an Old Strategy*. New York : New York Times.
- U.S Department of State. (2009). *Remarks With Colombian Foreign Minister Jaime Bermudez After Their Meeting*. Retrieved from U.S Department of State: <https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2009a/08/128023.htm>
- U.S Department of State. (2009, October 30). *U.S.- Colombia Defense Cooperation Agreement*. Retrieved from U.S Department of State Archive: <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/oct/131134.htm>
- U.S Department of State. (2013, August 12). *Diplomacy In Action*. Retrieved from U.S Department of State Web site: <https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2013/08/213076.htm>
- U.S Department of State. (2014, December 12). *Remarks with Colombian President Juan Manuel Santos*. Retrieved from U.S Department of State Web Site: <https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2014/12/234990.htm>
- U.S. Department of State. (2013, January 2). *Biography John Kerry*. Retrieved from U.S. Department of State Web site: <https://2009-2017.state.gov/r/pa/ei/biog/203657.htm>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2019, January 15). Retrieved from United Nations Office on Drugs and Crime: <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/legal-framework.html>
- United States Agency for International Development. (2016, February 17). *United States- Colombia Trade Promotion Agreement*. Retrieved from United States Agency for International Development: https://co.usembassy.gov/usaid/?_ga=2.126575241.500760137.1665161555-224230320.1664195056
- US Department of State. (2012). *The Colombia Strategic Development Initiative (CSDI)*. Retrieved from US Department of State Archive 2009-20017: <https://2009-2017.state.gov/p/wha/rls/fs/2012/187926.htm>
- W. D. Coplin, M. M. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.
- Weintraub, B. (1989). *President Offers Strategy for United States on Drug Control*. New York: New York Times.
- White, P. T. (1985). *The poppy for good and evil*. National Geographic.
- White, P. T. (1989). *Coca an ancient herb turns deadly*. National Geographic.
- William D Coplin, M. M. (1992). *Pengantar politik internasional : suatu telaah teoretis*. Bandung: Sinar Baru.